



METADATA STATISTIK SEKTORAL KOTA MALANG

TAHUN 2022



Diskominfo
— Pemerintah Kota Malang —

PERKANTORAN TERPADU GEDUNG A LT. IV
Jl. Mayjen Sungkono Malang



META DATA STATISTIK SEKTORAL

**KOTA MALANG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR



Metadata berisikan informasi mengenai karakteristik data dan memegang peran penting di dalam mekanisme pertukaran data. Melalui informasi metadata diharapkan pengguna data dapat menginterpretasikan data secara sama, bilamana pengguna melihat langsung data spasialnya. Dokumen metadata berisikan informasi yang menjelaskan karakteristik data terutama isi, kualitas, kondisi dan cara perolehannya.

Metadata Statistik Sektoral sangat strategis mengingat sebagai gambaran manajemen inventaris pengelolaan data dan berisikan informasi mengenai karakteristik data serta memegang peranan penting di dalam mekanisme pencarian maupun pertukaran data sektoral yang tersebar diseluruh perangkat daerah. Metadata tersebut dapat membantu para pengguna data untuk lebih memahami perolehan data maupun indikator

Kami berharap metadata ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan, tentunya metadata statistik sektoral ini masih ada kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami perlukan untuk perbaikan kualitas serupa dimasa yang akan datang.

Malang, Desember 2022



KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

MUHAMMAD NUR WIDIANTO, S.Sos.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700206 199602 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ii
Badan Keuangan dan Aset Daerah	1
Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia	7
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	11
Dinas Kesehatan	57
Dinas Komunikasi dan Informatika.....	91
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	101
Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	111
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	155
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	159
Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	167
Dinas Lingkungan Hidup	171
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	199
Inspektorat Daerah Kota Malang	213
Satuan Polisi Pamong Praja	219
Sekretariat Daerah	219
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	219
Sekretariat Dewan.....	219
Otoritas Jasa Keuangan	237

Kepolisian Resort Kota Malang	245
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	255
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	261
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	271
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang-Batu.....	271
Dinas Perhubungan.....	317
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	321
Badan Pusat Statistik	325



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nama	: Persentase belanja kesehatan
Indikator	
Bidang Urusan	: Keuangan
Konsep	: Belanja kesehatan
Definisi	: Pembiayaan pemerintah untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), atau bantuan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah belanja bidang urusan kesehatan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009

Nama	:	Persentase program/kegiatan yang tidak
Indikator		terlaksana
Bidang Urusan	:	Keuangan
Konsep	:	Program/kegiatan tidak terlaksana
Definisi	:	Perbandingan jumlah program atau kegiatan dalam APBD yang tidak dilaksanakan dibagi dengan total program atau kegiatan dalam APBD, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula	:	<i>Jumlah program atau kegiatan dalam</i>
Perhitungan		<i>APBD yang tidak dilaksanakan</i>
		$\frac{\text{Total program atau kegiatan dalam APBD}}{\text{Total program atau kegiatan dalam APBD}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	:	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh
Indikator		pajak domestik
Bidang Urusan	:	Keuangan
Konsep	:	Anggaran domestik
Definisi	:	Pajak Dalam Negeri/Domestik adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya (UU No. 4/ 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016). Anggaran Domestik diprosikan sebagai Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa (UU No. 4/2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Total pajak dalam daerah}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi pengeluaran utama pemerintah
Indikator	:	terhadap anggaran yang disetujui.
Bidang Urusan	:	Keuangan
Konsep	:	Pengeluaran utama pemerintah
Definisi	:	Perbandingan antara anggaran yang disetujui DPRD pada APBD dibagi dengan pengeluaran pemerintah daerah, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Anggaran yang disetujui DPRD pada APBD}}{\text{Pengeluaran pemerintah}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik



**BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Nama	:	Persentase pelanggaran pegawai
Indikator		
Bidang Urusan	:	Pengawasan
Konsep	:	Pelanggaran pegawai
Definisi	:	Pelanggaran pegawai adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman/sanksi disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah ASN yang dikenai sanksi}}{\text{Jumlah total ASN}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 6 Tahun 2022

Nama	:	Persentase keterwakilan perempuan sebagai
Indikator	:	pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).
Bidang Urusan	:	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	:	Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan
Definisi	:	Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di lembaga pemerintahan pada tingkat eksekutif (eselon I dan II) terhadap keseluruhan pengambil keputusan di lembaga eksekutif setara eselon I dan II.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Perempuan}}{\text{Jumlah total Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia
Referensi	:	Badan Kepegawaian Negara Badan Pusat Statistik



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK,
DAN KELUARGA BERENCANA**

Nama	: Angka pemakaian CPR bagi perempuan
Indikator	menikah usia 15 - 49
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Angka pemakaian CPR
Definisi	: Angka pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase.
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	:	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan
Indikator	:	anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Bidang Urusan	:	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	:	Tumbuh kembang anak
Definisi	:	Anak adalah seseorang yang sampai berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interselular, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan \& pembinaan tumbuh kembang}}{\text{Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Kesehatan No. 66 Tahun 2014

Nama Indikator	: Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Pembiayaan program
Definisi	: Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk. Sedangkan keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah anggaran untuk urusan PPKB}}{\text{Jumlah APBD dan APBDes}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014

Nama	:	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan
Indikator	:	Konseling Remaja/Mahasiswa
Bidang Urusan	:	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	:	Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa
Definisi	:	Perbandingan jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa dibagi dengan jumlah kecamatan, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah PIK R/M}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	:	Persentase penduduk yang hidup di bawah
Indikator	:	garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok usia.
Bidang Urusan	:	Sosial
Konsep	:	Garis kemiskinan nasional
Definisi	:	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional adalah banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase. Garis kemiskinan merupakan representase dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional}}{\text{Jumlah penduduk di periode yang sama}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase penduduk perempuan usia < 18
Indikator	:	tahun yang hidup dibawah garis kemiskinan
Bidang Urusan	:	Sosial
Konsep	:	Garis kemiskinan nasional
Definisi	:	Banyaknya penduduk perempuan usia < 18 tahun yang berada dibawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk perempuan usia < 18 tahun pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk perempuan usia < 18 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional}}{\text{Jumlah penduduk perempuan usia < 18 tahun}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase penduduk perempuan usia ≥ 18
Indikator		tahun yang hidup dibawah garis kemiskinan
Bidang Urusan	:	Sosial
Konsep	:	Garis kemiskinan nasional
Definisi	:	Banyaknya penduduk perempuan usia ≥ 18 tahun yang berada dibawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk perempuan usia ≥ 18 tahun pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.
Formula	:	<i>Jumlah penduduk perempuan usia ≥ 18 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional</i>
Perhitungan		$\frac{\text{Jumlah penduduk perempuan usia } \geq 18 \text{ tahun}}{\text{Jumlah penduduk perempuan usia } \geq 18 \text{ tahun}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase penduduk laki-laki usia < 18 tahun
Indikator	:	yang hidup dibawah garis kemiskinan
Bidang Urusan	:	Sosial
Konsep	:	Garis kemiskinan nasional
Definisi	:	Banyaknya penduduk laki-laki usia < 18 tahun yang berada dibawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk laki-laki usia < 18 tahun pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk laki - laki usia < 18 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional}}{\text{Jumlah penduduk laki - laki usia < 18 tahun}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase penduduk laki-laki usia ≥ 18 tahun
Indikator		yang hidup dibawah garis kemiskinan
Bidang Urusan	:	Sosial
Konsep	:	Garis kemiskinan nasional
Definisi	:	Banyaknya penduduk laki-laki usia ≥ 18 tahun yang berada dibawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk laki-laki usia ≥ 18 tahun pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk laki - laki usia } \geq 18 \text{ tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional}}{\text{Jumlah penduduk laki - laki usia } \geq 18 \text{ tahun}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama Indikator	: Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.
Bidang Urusan	: Sosial
Konsep	: Hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas
Definisi	: Jumlah penyandang disabilitas penerima program rehabilitasi sosial di bagi dengan jumlah populasi penyandang disabilitas.
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas penerima program rehabilitasi sosial}}{\text{Jumlah populasi penyandang disabilitas}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan
Indikator	:	bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.
Bidang Urusan	:	Sosial
Konsep	:	Program Keluarga Harapan
Definisi	:	Program Keluarga Harapan yaitu program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin dengan memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga/keluarga miskin dan rumah tangga/keluarga sangat miskin.
Formula Perhitungan	:	-
Satuan	:	Rumah Tangga/Keluarga
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi
Indikator	:	(CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (kelompok penduduk 40% terbawah)
Bidang Urusan	:	Sosial
Konsep	:	Penggunaan CPR
Definisi	:	Perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang sama, dinyatakan dalam satuan persen (%). Pertanyaan mengenai penggunaan alat/cara kontrasepsi baik modern maupun tradisional ditanyakan pada perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah PUS penduduk 40\% terbawah yang menjadi peserta KB aktif}}{\text{Jumlah PUS penduduk 40\% terbawah}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
Indikator		sosial.
Bidang Urusan	:	Sosial
Konsep	:	Kebutuhan dasar korban bencana sosial
Definisi	:	Jumlah absolut pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana sosial, termasuk bagi anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia.
Formula	:	-
Perhitungan		
Satuan	:	Rupiah
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Pendampingan psikososial korban bencana
Indikator	:	sosial.
Bidang Urusan	:	Sosial
Konsep	:	Psikososial korban bencana sosial
Definisi	:	Jumlah absolut pemberian asistensi sosial dalam bentuk pendampingan psikososial korban bencana sosial, termasuk bagi anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia.
Formula	:	-
Perhitungan	:	
Satuan	:	Bantuan;Asistensi
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
Indikator	:	bencana.
Bidang Urusan	:	Keuangan
Konsep	:	Kerugian akibat bencana
Definisi	:	Penilaian kerugian ekonomi pasca bencana pada berbagai sektor pembangunan (pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor) yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah kota.
Formula Perhitungan	:	-
Satuan	:	Rupiah
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.
Indikator	:	Indikator
Bidang Urusan	:	Sosial
Konsep	:	Sumber daya program pemberantasan kemiskinan
Definisi	:	Jumlah alokasi dana untuk penanggulangan kemiskinan dari seluruh sektor dibagi dengan total APBD dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah alokasi dana untuk penanggulangan kemiskinan dari seluruh sektor}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49
Indikator	:	tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana
Bidang Urusan	:	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	:	Perempuan usia reproduksi
Definisi	:	Persentase perempuan usia reproduksi 15-49 tahun (wanita usia subur/WUS) atau persentase perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang berstatus kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi (limiting) atau ingin menunda memiliki anak (spacing).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah perempuan usia reproduksi yang tidak ingin/menunda memiliki anak}}{\text{Jumlah perempuan usia reproduksi}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama Indikator	: Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Penggunaan alat kontrasepsi modern pada perempuan usia reproduksi
Definisi	: Persentase perempuan usia reproduksi 15-49 tahun (wanita usia subur/WUS) atau persentase perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang berstatus kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi (limiting) atau ingin menunda memiliki anak (spacing) dan menggunakan metode kontrasepsi modern.
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah perempuan usia reproduksi yang menggunakan kontrasepsi modern dan tidak ingin/menunda memiliki anak}}{\text{Jumlah perempuan usia reproduksi}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	:	Penggunaan MKJP
Definisi	:	Perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang menjadi peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (peserta KB yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang) dengan jumlah seluruh PUS pada periode yang sama dinyatakan dalam persentase
Formula	:	<i>Jumlah PUS yang menjadi peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang</i>
Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah kebijakan yang responsif gender
Indikator	:	mendukung pemberdayaan perempuan.
Bidang Urusan	:	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	:	Kebijakan responsif gender
Definisi	:	Sistem atau peraturan hukum yang berpihak pada kesetaraan gender tidak membedakan laki-laki dan perempuan terhadap akses, partisipasi, manfaat, kontrol terhadap sumber daya dan pembangunan.
Formula	:	-
Perhitungan	:	
Satuan	:	Kebijakan
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama Indikator	: Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (usia 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
Bidang Urusan	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	: Kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak perempuan
Definisi	: Perempuan dewasa dan anak perempuan (usia 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (usia 15-64 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah perempuan usia 15 – 64 tahun yang mengalami kekerasan oleh pasangan atau mantan pasangan}}{\text{Jumlah perempuan usia 15 – 64 tahun}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama Indikator	: Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (usia 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.
Bidang Urusan	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	: Kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak perempuan
Definisi	: Perempuan dewasa dan anak perempuan (usia 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah penduduk perempuan dewasa dan anak perempuan (usia 15-64 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah perempuan usia 15 – 64 tahun yang mengalami kekerasan oleh orang selain pasangan}}{\text{Jumlah perempuan usia 15 – 64 tahun}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama Indikator	: Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.
Bidang Urusan	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	: Layanan komprehensif kasus kekerasan terhadap perempuan
Definisi	: Jumlah perempuan dan anak perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan penanganan dan pendampingan secara komprehensif (sesuai SPM) pada periode waktu tertentu dibagi jumlah perempuan dan anak perempuan korban kekerasan pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah perempuan dan anak perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif}}{\text{Jumlah perempuan dan anak perempuan korban kekerasan}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama Indikator	: Proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum usia 15 tahun dan sebelum usia 18 tahun.
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Perempuan berstatus kawin atau hidup bersama pada usia dini
Definisi	: Jumlah perempuan usia 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama pada usia sebelum 18 tahun dibagi dengan jumlah penduduk perempuan usia 20-24 tahun dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah perempuan usia 20 – 24 tahun yang usia kawin atau hidup bersama pertama pada usia } \leq 18 \text{ tahun}}{\text{Jumlah perempuan usia 20 – 24 tahun}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Median usia kawin pertama perempuan
Indikator	:	pernah kawin usia 25-49 tahun.
Bidang Urusan	:	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	:	Usia kawin pertama
Definisi	:	Usia di mana 50% dari semua perempuan dalam kelompok usia sudah melakukan perkawinan.
Formula	:	-
Perhitungan	:	
Satuan	:	Tahun
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	: Angka kelahiran pada perempuan usia 15-19
Indikator	tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	: Age Spesific Fertility Rate (ASFR)
Definisi	: Banyaknya kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun pada periode tertentu, dibagi jumlah penduduk perempuan usia 15-19 tahun pada periode yang sama, yang dinyatakan dalam 1000 perempuan 15-19 tahun.
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah perempuan usia 15 – 19 tahun yang melahirkan}}{\text{Jumlah perempuan usia 15 – 19 tahun}} \times 1.000$
Satuan	: Proporsi permil (1.000)
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi perempuan yang berada di posisi
Indikator		managerial.
Bidang Urusan	:	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	:	Perempuan di posisi managerial
Definisi	:	Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di sejumlah area seperti pemerintah di tingkat eksekutif, legislatif, peradilan dan penegak hukum, serta perusahaan milik publik atau swasta.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah perempuan di posisi kepemimpinan di tingkat eksekutif, legislatif, peradilan dan penegak hukum, perusahaan swasta}}{\text{Jumlah pengambil keputusan di tingkat eksekutif, legislatif, peradilan dan penegak hukum, perusahaan swasta}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama Indikator	: Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.
Bidang Urusan	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep Definisi	: Perempuan usia 15-49 tahun : Perbandingan perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan terhadap jumlah penduduk perempuan usia 15-49 tahun.
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah perempuan usia 15 – 49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah perempuan usia 15 – 49 tahun}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia
Indikator	:	Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
Bidang Urusan	:	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Konsep	:	Pasangan Usia Subur (PUS)
Definisi	:	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang mengetahui paling sedikit satu alat/cara KB modern pada periode tertentu dibagi jumlah PUS usia 15-49 tahun pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula	:	<i>Jumlah PUS usia 15 – 49 tahun yang mengetahui paling sedikit satu alat KB modern</i>
Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah PUS usia 15 – 49 tahun yang mengetahui paling sedikit satu alat KB modern}}{\text{Jumlah PUS usia 15 – 49 tahun}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50
Indikator	:	persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.
Bidang Urusan	:	Sosial
Konsep	:	Median pendapatan
Definisi	:	Jumlah penduduk yang memiliki tingkat pengeluaran (proksi dari pendapatan) dibawah 50 persen dari nilai median pengeluaran dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang hidup di bawah 50\% median pengeluaran per kapita}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi penduduk perempuan yang hidup di
Indikator	:	bawah 50 persen dari median pendapatan
Bidang Urusan	:	Sosial
Konsep	:	Median pendapatan
Definisi	:	Jumlah penduduk perempuan yang memiliki tingkat pengeluaran (proksi dari pendapatan) dibawah 50 persen dari nilai median pengeluaran dibagi dengan jumlah penduduk perempuan pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk perempuan yang hidup di bawah 50\% median pengeluaran per kapita}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi penduduk laki-laki yang hidup di
Indikator		bawah 50 persen dari median pendapatan
Bidang Urusan	:	Sosial
Konsep	:	Median pendapatan
Definisi	:	Jumlah penduduk laki-laki yang memiliki tingkat pengeluaran (proksi dari pendapatan) dibawah 50 persen dari nilai median pengeluaran dibagi dengan jumlah penduduk laki-laki pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk laki - laki yang hidup di bawah 50\% median pengeluaran per kapita}}{\text{Jumlah penduduk laki - laki}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi penduduk penyandang disabilitas
Indikator	:	sensorik yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan
Bidang Urusan	:	Sosial
Konsep	:	Median pendapatan
Definisi	:	Jumlah penduduk penyandang disabilitas sensorik yang memiliki tingkat pengeluaran (proksi dari pendapatan) dibawah 50 persen dari nilai median pengeluaran dibagi dengan jumlah penduduk penyandang disabilitas sensorik pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk penyandang disabilitas sensorik yang hidup di bawah 50\% median pengeluaran per kapita}}{\text{Jumlah penduduk penyandang disabilitas sensorik}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi penduduk penyandang disabilitas
Indikator	:	mental yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan
Bidang Urusan	:	Sosial
Konsep	:	Median pendapatan
Definisi	:	Jumlah penduduk penyandang disabilitas mental yang memiliki tingkat pengeluaran (proksi dari pendapatan) dibawah 50 persen dari nilai median pengeluaran dibagi dengan jumlah penduduk penyandang disabilitas mental pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk penyandang disabilitas mental yang hidup di bawah 50\% median pengeluaran per kapita}}{\text{Jumlah penduduk penyandang disabilitas mental}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi penduduk penyandang disabilitas intelektual yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan
Indikator	:	Median pendapatan
Bidang Urusan	:	Sosial
Konsep	:	Median pendapatan
Definisi	:	Jumlah penduduk penyandang disabilitas intelektual yang memiliki tingkat pengeluaran (proksi dari pendapatan) dibawah 50 persen dari nilai median pengeluaran dibagi dengan jumlah penduduk penyandang disabilitas intelektual pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk penyandang disabilitas intelektual yang hidup di bawah 50\% median pengeluaran per kapita}}{\text{Jumlah penduduk penyandang disabilitas intelektual}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi penduduk penyandang disabilitas
Indikator	:	fisik yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan
Bidang Urusan	:	Sosial
Konsep	:	Median pendapatan
Definisi	:	Jumlah penduduk penyandang disabilitas fisik yang memiliki tingkat pengeluaran (proksi dari pendapatan) dibawah 50 persen dari nilai median pengeluaran dibagi dengan jumlah penduduk penyandang disabilitas fisik pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk penyandang disabilitas fisik yang hidup di bawah 50\% median pengeluaran per kapita}}{\text{Jumlah penduduk penyandang disabilitas fisik}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama Indikator	: Proporsi rumah tangga yang memiliki anak usia 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.
Bidang Urusan	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	: Hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh
Definisi	: Jumlah rumah tangga yang memiliki anak usia 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan atau agresi psikologis dibagi dengan jumlah rumah tangga yang memiliki anak usia 1-17 tahun pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki anak usia 1 – 17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan atau agresi psikologis}}{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki anak usia 1 – 17 tahun}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	:	Kekerasan terhadap anak
Definisi	:	Jumlah anak perempuan usia 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, seksual, dan emosional) dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah anak laki-laki dan anak perempuan pada periode yang sama dinyatakan dalam persentase.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah anak perempuan usia 13 – 17 tahun yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah anak perempuan usia 13 – 17 tahun}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	: Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki.
Indikator	
Bidang Urusan	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	: Kekerasan terhadap anak
Definisi	: Jumlah anak laki-laki usia 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, seksual, dan emosional) dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah anak laki-laki dan anak perempuan pada periode yang sama dinyatakan dalam persentase.
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah anak laki - laki usia 13 - 17 tahun yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah anak laki - laki usia 13 - 17 tahun}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi perempuan muda usia 18-24 tahun
Indikator	:	yang mengalami kekerasan seksual sebelum usia 18 tahun.
Bidang Urusan	:	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	:	Kekerasan seksual pada usia dini
Definisi	:	Jumlah perempuan muda usia 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum usia 18 tahun dibagi dengan jumlah perempuan usia 18-24 tahun, dinyatakan dalam satuan persen. Kekerasan seksual termasuk perlakuan salah secara seksual, dan eksploitasi seksual untuk melakukan hubungan seksual maupun tanpa hubungan seksual.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah perempuan muda usia 18 – 24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum usia 18 tahun}}{\text{Jumlah perempuan muda usia 18 – 24 tahun}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi laki-laki muda usia 18-24 tahun yang
Indikator	:	mengalami kekerasan seksual sebelum usia 18 tahun.
Bidang Urusan	:	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	:	Kekerasan seksual pada usia dini
Definisi	:	Jumlah laki-laki muda usia 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum usia 18 tahun dibagi dengan jumlah perempuan usia 18-24 tahun, dinyatakan dalam satuan persen. Kekerasan seksual termasuk perlakuan salah secara seksual, dan eksploitasi seksual untuk melakukan hubungan seksual maupun tanpa hubungan seksual.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah laki - laki muda usia 18 - 24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum usia 18 tahun}}{\text{Jumlah laki - laki muda usia 18 - 24 tahun}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan
Indikator		
Bidang Urusan	:	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	:	Kekerasan terhadap perempuan
Definisi	:	Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenangwenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran
Indikator	:	Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan
Bidang Urusan	:	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	:	Penanganan pengaduan pelanggaran HAM terhadap perempuan
Definisi	:	Hak Asasi Perempuan adalah hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi atas dasar ras, etnis, jenis kelamin, agama/keyakinan, orientasi politik, kelas dan pekerjaan, dll terutama berbasis gender. Yang dimaksud dengan penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan adalah semua kasus pengaduan pelanggaran HAM yang melanggar HAM perempuan seperti tersebut di atas yang ditangani oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dilaporkan oleh mitra maupun yang dipantau oleh Komnas Perempuan.
Formula Perhitungan	:	-
Satuan	:	Kasus
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah orang atau kelompok masyarakat
Indikator	:	miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi
Bidang Urusan	:	Sosial
Konsep	:	Bantuan hukum terhadap masyarakat miskin
Definisi	:	Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum. Orang miskin adalah orang atau kelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
Formula Perhitungan	:	-
Satuan	:	Orang
Produsen Data	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Undang-Undang No. 16 Tahun 2011



DINAS KESEHATAN

Nama	:	Proporsi anak balita yang tidur dengan
Indikator		kelambu berinsektisida
Bidang Urusan	:	Kesehatan
Konsep	:	Balita tidur dengan kelambu berinsektisida
Definisi	:	Perbandingan jumlah anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida dibagi dengan jumlah balita, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah balita yang pada malam hari tidur menggunakan kelambu yang sudah diproteksi dengan insektisida}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Kesehatan
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	:	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir
Indikator	:	Kesehatan
Bidang Urusan	:	Kesehatan
Konsep	:	Penggunaan kondom
Definisi	:	Perbandingan jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memakai kondom saat berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap dibagi dengan jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Banyaknya penduduk usia 15 – 24 tahun yang memakai kondom berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap}}{\text{Banyaknya penduduk usia 15 – 24 tahun yang berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Kesehatan
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	:	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Kesehatan
Konsep	:	Stunting
Definisi	:	Jumlah anak balita pendek dan sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Kondisi stunting diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut usia (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. 1. Sangat pendek : Zscore <-3,0 2. Pendek : Zscore ≥- 3,0 s/d Zscore < -2,0
Formula	:	
Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah anak balita pendek dan sangat pendek (stunting)}}{\text{Jumlah anak balita}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Kesehatan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
Indikator	:	SJSN Bidang Kesehatan.
Bidang Urusan	:	Kesehatan
Konsep	:	Peserta jaminan kesehatan
Definisi	:	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial/BPJS) dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40% terbawah/pendapatan terendah).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin dan rentan yang menjadi peserta jaminan kesehatan}}{\text{Jumlah penduduk miskin dan rentan}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Kesehatan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama Indikator	:	Persentase perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
Bidang Urusan	:	Kesehatan
Konsep	:	Perempuan melahirkan di fasilitas kesehatan
Definisi	:	Perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dengan jumlah perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan, dinyatakan dengan persentase.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah perempuan pernah kawin usia 15 – 49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup di fasilitas kesehatan dalam dua tahun terakhir}}{\text{Jumlah perempuan pernah kawin usia 15 – 49 tahun}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Kesehatan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase anak usia 12-23 bulan yang
Indikator	:	menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40% terbawah)
Bidang Urusan	:	Kesehatan
Konsep	:	Anak dengan imunisasi dasar lengkap
Definisi	:	Perbandingan antara banyaknya anak usia 12-23 bulan yang telah menerima imunisasi dasar lengkap berupa DPT (3 kali), Polio (4 kali), campak (1 kali), BCG (1 kali), dan hepatitis B (4 kali terhadap jumlah anak usia 12-23 bulan seluruhnya pada periode yang sama. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2). Catatan: dalam penghitungan indikator, jumlah imunisasi yang diterima yaitu DPT (3 kali), Polio (3 kali), campak (1 kali), BCG (1 kali), dan hepatitis B (3 kali).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah anak usia 12 – 23 bulan yang telah menerima imunisasi dasar lengkap}}{\text{Jumlah anak usia 12 – 23 bulan}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Kesehatan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama Indikator	: Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.
Bidang Urusan	: Kesehatan
Konsep	: Stunting pada baduta
Definisi	: Jumlah anak baduta stunting (pendek dan sangat pendek) pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak baduta pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah anak baduta pendek dan sangat pendek (stunting)}}{\text{Jumlah anak baduta}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Kesehatan
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Prevalensi anemia pada ibu hamil.
Indikator		
Bidang Urusan	:	Kesehatan
Konsep	:	Anemia pada ibu hamil
Definisi	:	Jumlah ibu hamil anemia di suatu wilayah pada periode tertentu dibagi dengan jumlah seluruh ibu hamil yang diperiksa di suatu wilayah pada periode tertentu dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil anemia}}{\text{Jumlah ibu hamil}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Kesehatan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang
Indikator		mendapatkan ASI eksklusif.
Bidang Urusan	:	Kesehatan
Konsep	:	ASI eksklusif
Definisi	:	Persentase bayi usia di bawah 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (ASI saja tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat dan vitamin, mineral) terhadap seluruh bayi berusia di bawah 6 bulan.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah bayi usia} < 6 \text{ bulan yang mendapatkan ASI eksklusif}}{\text{Jumlah seluruh bayi usia} < 6 \text{ bulan}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Kesehatan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.
Indikator		
Bidang Urusan	:	Kesehatan
Konsep	:	HIV
Definisi	:	Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan usia 15-49 tahun yang positif HIV dibagi dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada usia yang sama (yaitu 15-49 tahun).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 – 49 tahun yang positif HIV}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 – 49 tahun}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Kesehatan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah orang yang memerlukan intervensi
Indikator	:	terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.
Bidang Urusan	:	Kesehatan
Konsep	:	Filiaris dan Kusta
Definisi	:	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta dibagi dengan jumlah orang yang mengidap penyakit Filiaris dan Kusta.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit Filariasis dan Kusta}}{\text{Jumlah orang yang mengidap penyakit Filariasis dan Kusta}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Kesehatan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah orang yang memerlukan intervensi
Indikator	:	terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis.
Bidang Urusan	:	Kesehatan
Konsep	:	Filiaris
Definisi	:	Jumlah penduduk di kabupaten/kota dengan Mikrofiaria rate (Mf-rate)>1% yang mendapat POPM Filariasis dibagi jumlah seluruh penduduk di kabupaten/kota dengan Mf-rate>1% dan dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk kota dengan Mf - rate} > 1\% \text{ yang mendapat POPM Filariasis}}{\text{Jumlah seluruh penduduk kota dengan Mf - rate} > 1\%} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Kesehatan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah orang yang memerlukan intervensi
Indikator	:	terhadap penyakit tropis yang terabaikan (b) Kusta.
Bidang Urusan	:	Kesehatan
Konsep	:	Kusta
Definisi	:	Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan dan diobati dibagi semua kasus baru kusta dan dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan dan diobati}}{\text{Jumlah seluruh kasus baru kusta}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Kesehatan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase merokok pada penduduk usia ≤18 tahun.
Indikator	:	Kesehatan
Bidang Urusan	:	Kesehatan
Konsep	:	Perokok usia ≤18 tahun
Definisi	:	Perbandingan jumlah penduduk usia 10-18 tahun yang merokok dengan jumlah penduduk usia 10-18 tahun dinyatakan dalam persentase (%).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 10 – 18 tahun yang merokok}}{\text{Jumlah penduduk usia 10 – 18 tahun}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Kesehatan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	: Prevalensi tekanan darah tinggi.
Indikator	
Bidang Urusan	: Kesehatan
Konsep	: Tekanan darah tinggi
Definisi	: Perbandingan jumlah penduduk usia ≥ 18 tahun dengan hasil pengukuran tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg dengan jumlah penduduk usia ≥ 18 tahun dinyatakan dalam persentase (%).
Formula	: $\frac{\text{Jumlah penduduk usia } \geq 18 \text{ tahun dengan tekanan darah tinggi}}{\text{Jumlah penduduk usia } \geq 18 \text{ tahun}} \times 100\%$
Perhitungan	
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Kesehatan
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Prevalensi obesitas pada penduduk usia ≥18 tahun.
Indikator	:	Kesehatan
Bidang Urusan	:	Obesitas usia ≥18 tahun.
Konsep	:	Persentase jumlah penduduk usia ≥18 tahun dengan hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥ 25.
Definisi	:	
Formula	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia } \geq 18 \text{ tahun dengan hasil pengukuran IMT } \geq 25}{\text{Jumlah penduduk usia } \geq 18 \text{ tahun}} \times 100\%$
Perhitungan	:	
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Kesehatan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.
Indikator		
Bidang Urusan	:	Sosial
Konsep	:	Penyalahgunaan narkoba
Definisi	:	Jumlah sampel penduduk berusia 10-59 tahun yang pernah menggunakan narkoba dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah penduduk berusia 10-59 tahun yang dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 10 – 59 tahun yang pernah menggunakan narkoba}}{\text{Jumlah penduduk usia 10 – 59 tahun}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Kesehatan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh
Indikator	:	penduduk usia ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.
Bidang Urusan	:	Sosial
Konsep	:	Konsumsi alkohol
Definisi	:	Jumlah minuman mengandung alkohol (liter) yang dikonsumsi oleh penduduk usia ≥ 15 tahun dalam setahun terakhir dibagi jumlah seluruh penduduk usia ≥ 15 tahun dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula	:	$\frac{\text{Jumlah minuman mengandung alkohol (liter) yang dikonsumsi oleh penduduk usia } \geq 15 \text{ tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia } \geq 15 \text{ tahun}} \times 100\%$
Perhitungan	:	
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Kesehatan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	: Unmet need pelayanan kesehatan.
Indikator	
Bidang Urusan	: Kesehatan
Konsep	: Unmet need
Definisi	: Perbandingan antara banyaknya penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya namun tidak berobat jalan dibagi dengan jumlah penduduk, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya namun tidak berobat jalan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Kesehatan
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.
Indikator	:	Kesehatan
Bidang Urusan	:	Asuransi kesehatan
Konsep	:	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (baik BPJS Kesehatan, Jamkesda maupun asuransi swasta, perusahaan atau kantor) dinyatakan dalam satuan persen (%).
Definisi	:	
Formula	:	<i>Jumlah penduduk yang memiliki</i>
Perhitungan	:	$\frac{\textit{jaminan kesehatan}}{\textit{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Kesehatan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	: Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Indikator	
Bidang Urusan	: Kesehatan
Konsep	: Jaminan Kesehatan Nasional
Definisi	: Perbandingan banyaknya penduduk yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan dengan jumlah seluruh penduduk dan dinyatakan dalam satuan persen (%)
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah penduduk yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Kesehatan
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi kematian akibat keracunan.
Indikator		
Bidang Urusan	:	Kesehatan
Konsep	:	Keracunan
Definisi	:	Perbandingan jumlah kematian akibat keracunan dibagi dengan jumlah seluruh kematian dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula	:	$\frac{\text{Jumlah kematian akibat keracunan}}{\text{Jumlah kematian}} \times 100\%$
Perhitungan		
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Kesehatan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase merokok pada penduduk usia ≥ 15
Indikator		tahun.
Bidang Urusan	:	Kesehatan
Konsep	:	Perokok usia ≥ 15 tahun
Definisi	:	Perbandingan antara banyaknya penduduk usia ≥ 15 tahun yang merokok selama sebulan terakhir dengan jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia } \geq 15 \text{ tahun yang merokok selama sebulan terakhir}}{\text{Jumlah penduduk usia } \geq 15 \text{ tahun}} \times 100\%$
Perhitungan		
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Kesehatan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di
Indikator		Puskesmas.
Bidang Urusan	:	Kesehatan
Konsep	:	Ketersediaan obat dan vaksin
Definisi	:	Perbandingan jumlah puskesmas dengan kecukupan ketersediaan obat dan vaksin esensial dibagi jumlah seluruh puskesmas dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah puskesmas dengan kecukupan ketersediaan obat dan vaksin esensial}}{\text{Jumlah puskesmas}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Kesehatan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	: Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.
Indikator	
Bidang Urusan	: Kesehatan
Konsep	: Tenaga kesehatan
Definisi	: Untuk mengukur kepadatan tenaga kesehatan di suatu wilayah dapat digunakan rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk. Tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga teknis biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain.
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah seluruh penduduk}} \times 1.000$
Satuan	: Proporsi per 1.000 penduduk
Produsen Data	: Dinas Kesehatan
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Undang-Undang No. 36 Tahun 2014

Nama	:	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air
Indikator	:	Kesehatan
Bidang Urusan	:	Fasilitas cuci tangan
Konsep	:	Jumlah penduduk yang bertempat tinggal di satuan wilayah yang mempunyai fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
Definisi	:	
Formula	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk dengan akses pada fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
Perhitungan	:	
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Kesehatan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Insiden Tuberkolosis (ITB) per 100.000 penduduk.
Indikator	:	Kesehatan
Bidang Urusan	:	Tuberkulosis
Konsep	:	Jumlah semua kasus TB baru dan kambuh pada waktu tertentu dibagi jumlah penduduk pada periode waktu yang sama kemudian dikali 100.000.
Definisi	:	
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah semua kasus TB baru dan kambuh}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$
Satuan	:	Proporsi per 100.000 penduduk
Produsen Data	:	Dinas Kesehatan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Kejadian Malaria per 1000 orang.
Indikator		
Bidang Urusan	:	Kesehatan
Konsep	:	Malaria
Definisi	:	Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Kesakitan malaria digambarkan dengan insidens malaria, dalam hal ini Annual Parasite Incidence (API). API adalah angka kesakitan per 1.000 penduduk berisiko dalam satu tahun. Angka API digunakan untuk menentukan tingkat endemisitas malaria di suatu daerah. Endemisitas malaria sangat dipengaruhi oleh sistem kesehatan yang buruk, meningkatnya resistensi terhadap pemakaian obat dan insektisida, pola perubahan iklim, gaya hidup, upaya penanggulangan vector, migrasi dan pemindahan penduduk.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah kasus malaria positif}}{\text{Jumlah penduduk berisiko}} \times 1.000$
Satuan	:	Proporsi per 1.000 penduduk
Produsen Data	:	Dinas Kesehatan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Sosial
Konsep	:	Layanan rehabilitasi medis
Definisi	:	Jumlah absolut pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan zat, termasuk narkotika dan alkohol, yang mengakses layanan pascarehabilitasi, setelah selesai menjalani program rehabilitasi.
Formula	:	-
Perhitungan	:	
Satuan	:	Orang
Produsen Data	:	Dinas Kesehatan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi
Indikator	:	rehabilitasi
Bidang Urusan	:	Sosial
Konsep	:	Layanan pasca rehabilitasi
Definisi	:	Jumlah absolut pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan zat, termasuk narkotika dan alkohol, yang mengakses layanan pascarehabilitasi, setelah selesai menjalani program rehabilitasi.
Formula	:	-
Perhitungan	:	
Satuan	:	Orang
Produsen Data	:	Dinas Kesehatan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang
Indikator	:	mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.
Bidang Urusan	:	Sosial
Konsep	:	Rehabilitasi sosial di dalam panti
Definisi	:	Pecandu/penyalahgunaan/korban penyalahgunaan zat, termasuk narkotika dan alkohol, yang telah selesai mengikuti rehabilitasi sosial dalam panti (atau balai/loka/lembaga rehabilitasi sosial) milik pemerintah dan masyarakat.
Formula Perhitungan	:	-
Satuan	:	Jiwa
Produsen Data	:	Dinas Kesehatan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban
Indikator	:	penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.
Bidang Urusan	:	Sosial
Konsep	:	Lembaga rehabilitasi sosial
Definisi	:	Lembaga rehabilitasi sosial baik milik pemerintah maupun masyarakat yang telah menerima bantuan dan/atau pengembangan kelembagaan, baik dari sisi manajerial, SDM dan teknis pelayanan.
Formula	:	-
Perhitungan		
Satuan	:	Lembaga
Produsen Data	:	Dinas Kesehatan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nama	:	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon
Indikator	:	HP/telepon
Bidang Urusan	:	Komunikasi dan Informatika
Konsep	:	Penduduk yang menggunakan HP
Definisi	:	Perbandingan jumlah penduduk yang menggunakan HP/telepon dibagi dengan jumlah penduduk, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	:	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.
Indikator	:	telepon genggam.
Bidang Urusan	:	Komunikasi dan Informatika
Konsep	:	Telepon genggam
Definisi	:	Telepon genggam/Telepon seluler, termasuk smartphone adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang menguasai atau memiliki telepon genggam}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Komunikasi dan Informatika
Konsep	:	Mobile broadband
Definisi	:	Akses bergerak pitalebar (mobile broadband) adalah akses yang berkecepatan 2 MBadan Pusat Statistik untuk akses tetap (fixed) dan 1 MBadan Pusat Statistik untuk akses bergerak (mobile), sedangkan kecepatan akses tulang punggung (backbone) mencapai orde ratusan GBadan Pusat Statistik.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani mobile broadband}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	: Proporsi individu yang menggunakan internet
Indikator	
Bidang Urusan	: Komunikasi dan Informatika
Konsep	: Internet
Definisi	: Internet (interconnection-networking) adalah sebuah sistem jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia secara global. Fasilitas menyediakan akses ke sejumlah layanan komunikasi termasuk halaman world wide web (www), surat elektronik (email), berita, hiburan dan data. Fasilitas akses internet tidak diasumsikan hanya melalui komputer, dimungkinkan juga menggunakan telepon selular, PDA, perangkat game elektronik, televisi digital, dll. Akses bisa melalui suatu jaringan tetap maupun selular.
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan internet}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama Indikator	: Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Bidang Urusan	: Komunikasi dan Informatika
Konsep	: Sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Definisi	: Jumlah PPID yang telah mengikuti pelatihan dan telah lulus sertifikasi PPID dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir.
Formula Perhitungan	: -
Satuan	: Pejabat
Produsen Data	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Komunikasi dan Informatika
Konsep	:	Fixed broadband
Definisi	:	Akses tetap pitalebar (fixed broadband) adalah akses yang berkecepatan 2 MBadan Pusat Statistik untuk akses tetap (fixed) dan 1 MBadan Pusat Statistik untuk akses bergerak (mobile), sedangkan kecepatan akses tulang punggung (backbone) mencapai orde ratusan GBadan Pusat Statistik. Akses tetap pita lebar perkotaan sebesar 20 MBadan Pusat Statistik an di pedesaan sebesar 10 MBadan Pusat Statistik.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga terkoneksi fixed broadband}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur danam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Komunikasi dan Informatika
Konsep	:	UU Keterbukaan Informasi Publik
Definisi	:	Diukur dengan indikator kewajiban mengumumkan informasi publik, kewajiban menyediakan informasi publik, kewajiban mengelola dan kewajiban mendokumentasikan informasi publik, serta kewajiban layanan informasi publik, yang ditunjukkan dengan kriteria: 1) Peningkatan kewajiban mengumumkan informasi publik; 2) Peningkatan kewajiban menyediakan informasi publik; 3) Peningkatan kewajiban mengelola dan kewajiban; mendokumentasikan informasi publik; dan 4) Peningkatan kewajiban layanan informasi publik.
Formula	:	-
Perhitungan	:	
Satuan	:	Badan Publik
Produsen Data	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
Indikator	:	publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
Bidang Urusan	:	Komunikasi dan Informatika
Konsep	:	Penyelesaian sengketa informasi publik
Definisi	:	Jumlah penyelesaian permohonan sengketa informasi teregister per tahun berjalan dibagi dengan seluruh jumlah register sengketa per tahun berjalan, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian permohonan sengketa informasi teregister}}{\text{Jumlah register sengketa}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Statistik
Konsep	:	Pengunjung website statistik
Definisi	:	Kemampuan lembaga pemerintah yang membidangi bidang statistik untuk menyajikan data dan informasi statistik yang berkualitas yaitu: cepat, mudah diperoleh, dan dapat dipertanggungjawabkan (reliable) melalui website.
Formula	:	-
Perhitungan	:	
Satuan	:	Pengunjung
Produsen Data	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik



**DINAS KOPERASI,
INDUSTRI, DAN
PERDAGANGAN**

Nama	:	Cakupan bina kelompok pengrajin
Indikator		
Bidang Urusan	:	Perindustrian
Konsep	:	Kelompok pengrajin
Definisi	:	Perbandingan jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan dari pemerintah daerah dibagi dengan jumlah kelompok pengrajin, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda}}{\text{Jumlah kelompok pengrajin}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	:	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Perindustrian
Konsep	:	Akses UMKM ke layanan keuangan
Definisi	:	Layanan Keuangan merupakan bentuk layanan dari lembaga bank maupun bukan bank yang menyalurkan pembiayaan baik berupa pinjaman maupun penyertaan modal.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah rekening kredit UMKM}}{\text{Jumlah total UMKM}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.
Indikator		
Bidang Urusan	:	Perindustrian
Konsep	:	Kredit UMKM
Definisi	:	Kredit UMKM merupakan semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelapor dengan bank dan pihak ketiga bukan bank yang memenuhi kriteria usaha sesuai undang-undang tentang UMKM yang berlaku.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah kredit UMKM}}{\text{Total kredit}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.
Indikator		manufaktur.
Bidang Urusan	:	Perindustrian
Konsep	:	Tenaga kerja industri manufaktur
Definisi	:	Tenaga kerja adalah semua orang yang bekerja pada suatu usaha dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang (pekerja dibayar) maupun pekerja pemilik dan/atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan usaha tetapi tidak dibayar (pekerja tidak dibayar). Bagi pekerja keluarga yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja normal (satu shift) tidak dianggap pekerja. Industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru, terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja industri manufaktur}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Perindustrian
Konsep	:	Nilai tambah industri kecil
Definisi	:	Industri Kecil adalah usaha industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, termasuk pemilik dan pekerja keluarga. Nilai tambah industri kecil merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (pengurangan output dengan input antara) yang dihasilkan oleh industri kecil.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Nilai tambah industri kecil}}{\text{Total nilai tambah industri}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama Indikator	: Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.
Bidang Urusan	: Perindustrian
Konsep	: Pinjaman atau kredit
Definisi	: Industri Kecil adalah usaha industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, termasuk pemilik dan pekerja keluarga. Kredit yang diberikan adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelapor dengan bank dan pihak ketiga bukan bank. Dalam perhitungan indikator ini fokus terhadap industri kecil (industri pengolahan) yang menerima pinjaman atau kredit.
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah industri kecil yang mendapatkan pinjaman atau kredit}}{\text{Jumlah industri kecil}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	: Jumlah perusahaan yang menerapkan
Indikator	sertifikasi SNI ISO 14001.
Bidang Urusan	: Perindustrian
Konsep	: Sertifikasi SNI ISO 14001
Definisi	: Perusahaan yang mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan mengelola aspek lingkungan berdasarkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang mengacu pada standar nasional dan internasional.
Formula	: -
Perhitungan	
Satuan	: Perusahaan
Produsen Data	: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Perindustrian
Konsep	:	Produk ramah lingkungan
Definisi	:	Jumlah produk barang/jasa publik yang melalui pengadaan barang/jasa publik ramah lingkungan yang teregister (green public procurement, GPP) untuk memperoleh produk barang/jasa ramah lingkungan yang bermanfaat kepada lembaga/institusi/perusahaan dan masyarakat serta manfaat ekonomi, dengan dampak lingkungan yang minimal.
Formula	:	-
Perhitungan	:	
Satuan	:	Register
Produsen Data	:	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik



**DINAS TENAGA KERJA
PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Nama	:	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk
Indikator	:	usia 15 tahun ke atas
Bidang Urusan	:	Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Konsep	:	Kesempatan kerja
Definisi	:	Kesempatan kerja adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan perluasan kesempatan kerja di setiap sektor sesuai dengan kewenangannya.
Formula	:	$\frac{\text{Kesempatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100\%$
Perhitungan	:	
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 Tahun 2013

Nama	:	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri
Indikator	:	dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja
Bidang Urusan	:	Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Konsep	:	Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga
Definisi	:	Perbandingan jumlah tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga dibagi dengan total kesempatan kerja, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga}}{\text{Total kesempatan kerja}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	:	Besaran kasus ketenagakerjaan yang
Indikator		diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Kasus ketenagakerjaan yang selesai dengan Perjanjian Bersama
Definisi	:	Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dalam hal perundingan yang dilakukan ketika terjadi kasus ketenagakerjaan dan menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)}}{\text{Jumlah kasus yang dicatatkan}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

Nama	:	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
Indikator	:	ditempatkan
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Pencari kerja yang ditempatkan
Definisi	:	Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan. Penempatan tenaga kerja bertujuan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi keahlian, keterampilan, minat, bakat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 39 Tahun 2016

Nama	:	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap
Indikator	:	kebijakan pemerintah daerah
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Perselisihan terhadap kebijakan pemerintah daerah
Definisi	:	Perbandingan jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemerintah daerah dibagi dengan jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemerintah daerah, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda}}{\text{Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	:	Besaran Pemeriksaan Perusahaan
Indikator		
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Pemeriksaan perusahaan
Definisi	:	Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh bahan keterangan tentang suatu keadaan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka tindakan korektif.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah diperiksa}}{\text{Jumlah perusahaan yang terdaftar}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1995

Nama	:	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan
Indikator		
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Pengujian peralatan perusahaan
Definisi	:	Pengujian adalah rangkaian kegiatan penilaian suatu obyek secara teknis atau medis yang mempunyai resiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis atau medis yang telah ditetapkan.
Formula	:	$\frac{\text{Jumlah peralatan yang telah diuji}}{\text{Jumlah peralatan yang telah terdaftar}} \times 100\%$
Perhitungan		
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1995

Nama	:	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Pelatihan berbasis kompetensi
Definisi	:	Perbandingan jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi dengan jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula	:	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang dilatih}}{\text{Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi}} \times 100\%$
Perhitungan	:	
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	:	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Pelatihan berbasis masyarakat
Definisi	:	Perbandingan jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi dengan jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang dilatih}}{\text{Jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	:	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
Indikator	:	Tenaga Kerja
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Pelatihan kewirausahaan
Definisi	:	Perbandingan jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi dengan jumlah pendaftar pelatihan berbasis kewirausahaan, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang dilatih}}{\text{Jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	:	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN
Indikator	:	(milyar rupiah)
Bidang Urusan	:	Penanaman Modal
Konsep	:	Nilai realisasi PMDN
Definisi	:	Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Realisasi PMDN}_t - \text{Realisasi PMDN}_{t-1}}{\text{Realisasi PMDN}_{t-1}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	: Proporsi peserta Program Jaminan Sosial
Indikator	Bidang Ketenagakerjaan.
Bidang Urusan	: Tenaga Kerja
Konsep	: Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
Definisi	: Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan terdiri atas: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKm).
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah pekerja yang memiliki jaminan sosial bidang ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah seluruh pekerja}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Lapangan kerja informal sektor non-pertanian
Definisi	:	Pekerja informal di sektor non-pertanian adalah penduduk yang bekerja di sektor non pertanian dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, pekerja bebas.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang bekerja informal di sektor non pertanian}}{\text{Jumlah seluruh penduduk yang bekerja di sektor non pertanian}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian untuk jenis kelamin perempuan.
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Lapangan kerja informal sektor non-pertanian
Definisi	:	Perbandingan jumlah penduduk perempuan yang bekerja informal di sektor non-pertanian dibagi dengan jumlah seluruh penduduk perempuan yang bekerja di sektor non-pertanian, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula	:	<i>Jumlah penduduk perempuan yang bekerja informal di sektor non pertanian</i>
Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk perempuan yang bekerja informal di sektor non pertanian}}{\text{Jumlah seluruh penduduk perempuan yang bekerja di sektor non pertanian}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian untuk jenis kelamin laki-laki.
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Lapangan kerja informal sektor non-pertanian
Definisi	:	Perbandingan jumlah penduduk laki-laki yang bekerja informal di sektor non-pertanian dibagi dengan jumlah seluruh penduduk laki-laki yang bekerja di sektor non-pertanian, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula	:	<i>Jumlah penduduk laki – laki yang bekerja informal di sektor non pertanian</i>
Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah seluruh penduduk laki – laki yang bekerja di sektor non pertanian}}{\text{Jumlah seluruh penduduk laki – laki yang bekerja di sektor non pertanian}} \times 100\%$
Satuan	:	
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase tenaga kerja formal.
Indikator		
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Tenaga kerja formal
Definisi	:	Tenaga kerja formal merupakan penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai.
Formula	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal}}{\text{Jumlah penduduk yang bekerja}} \times 100\%$
Perhitungan		
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Tenaga kerja informal sektor pertanian
Definisi	:	Pekerja informal di sektor pertanian adalah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, pekerja bebas.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang bekerja informal di sektor pertanian}}{\text{Jumlah penduduk yang bekerja}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Upah rata-rata per jam pekerja.
Indikator		
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Upah pekerja
Definisi	:	Upah rata-rata per jam kerja merupakan imbalan atau penghasilan rata-rata yang diperoleh tiap jam baik berupa uang maupun barang.
Formula	:	<i>Upah baik uang maupun barang yang diperoleh</i>
Perhitungan		$\frac{\text{dalam sebulan}}{\text{Jumlah jam kerja aktual seminggu}}$
Satuan	:	Rupiah
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang
Indikator	:	sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Usia muda NEET
Definisi	:	Kategori usia muda merupakan laki-laki dan perempuan yang berusia 15 – 24 tahun.
Formula	:	<i>Penduduk usia muda (15 – 24) yang tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan</i>
Perhitungan	:	$\frac{\text{Penduduk usia muda (15 – 24) yang tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 – 24 tahun}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia

Nama	:	Jumlah fasilitas pelayanan penempatan TKLN
Indikator	:	berdasarkan okupasi
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Penempatan TKLN
Definisi	:	<p>Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.</p> <p>Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan.</p>
Formula Perhitungan	:	-
Satuan	:	Pelayanan
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia

Nama Indikator	: Persentase setengah pengangguran
Bidang Urusan	: Tenaga Kerja
Konsep	: Setengah pengangguran
Definisi	: Pekerja setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah pekerja yang bekerja kurang dari jam kerja normal}}{\text{Jumlah penduduk yang bekerja}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia

Nama	:	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia.
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Tingkat pengangguran terbuka
Definisi	:	<p>Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.</p> <p>Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.</p> <p>Konsep pengangguran yaitu (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.</p>
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia

Nama	:	Tingkat pengangguran terbuka untuk
Indikator		kelompok Perempuan usia 15-19 Tahun
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Tingkat pengangguran terbuka
Definisi	:	Perbandingan penduduk perempuan usia 15-19 tahun yang termasuk dalam kategori pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan usia 15-19 tahun dikali dengan 100 persen.
Formula	:	<i>Jumlah pengangguran perempuan</i>
Perhitungan		$\frac{\text{usia 15 – 19 tahun}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100\%$ <i>usia 15 – 19 tahun</i>
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia

Nama	:	Tingkat pengangguran terbuka untuk
Indikator		kelompok Perempuan usia 20-24 Tahun
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Tingkat pengangguran terbuka
Definisi	:	Perbandingan penduduk perempuan usia 20-24 tahun yang termasuk dalam kategori pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan usia 20-24 tahun dikali dengan 100 persen.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah pengangguran perempuan usia 20 – 24 tahun}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan usia 20 – 24 tahun}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia

Nama	:	Tingkat pengangguran terbuka untuk
Indikator		kelompok Perempuan usia 25-29 Tahun
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Tingkat pengangguran terbuka
Definisi	:	Perbandingan penduduk perempuan usia 25-29 tahun yang termasuk dalam kategori pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan usia 25-29 tahun dikali dengan 100 persen.
Formula	:	<i>Jumlah pengangguran perempuan</i>
Perhitungan		$\frac{\text{usia 25 – 29 tahun}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100\%$ <i>usia 25 – 29 tahun</i>
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia

Nama	: Tingkat pengangguran terbuka untuk
Indikator	kelompok Perempuan usia 30-34 Tahun
Bidang Urusan	: Tenaga Kerja
Konsep	: Tingkat pengangguran terbuka
Definisi	: Perbandingan penduduk perempuan usia 30-34 tahun yang termasuk dalam kategori pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan usia 30-34 tahun dikali dengan 100 persen.
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah pengangguran perempuan usia 30 – 34 tahun}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan usia 30 – 34 tahun}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia

Nama	:	Tingkat pengangguran terbuka untuk
Indikator		kelompok Perempuan usia 35-39 Tahun
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Tingkat pengangguran terbuka
Definisi	:	Perbandingan penduduk perempuan usia 35-39 tahun yang termasuk dalam kategori pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan usia 35-39 tahun dikali dengan 100 persen.
Formula	:	<i>Jumlah pengangguran perempuan</i>
Perhitungan		$\frac{\text{usia 35 – 39 tahun}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100\%$ <i>usia 35 – 39 tahun</i>
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia

Nama	: Tingkat pengangguran terbuka untuk
Indikator	kelompok Perempuan usia 40-44 Tahun
Bidang Urusan	: Tenaga Kerja
Konsep	: Tingkat pengangguran terbuka
Definisi	: Perbandingan penduduk perempuan usia 40-44 tahun yang termasuk dalam kategori pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan usia 40-44 tahun dikali dengan 100 persen.
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah pengangguran perempuan usia 40 – 44 tahun}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan usia 40 – 44 tahun}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia

Nama	:	Tingkat pengangguran terbuka untuk
Indikator		kelompok Perempuan usia 45-49 Tahun
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Tingkat pengangguran terbuka
Definisi	:	Perbandingan penduduk perempuan usia 45-49 tahun yang termasuk dalam kategori pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan usia 45-49 tahun dikali dengan 100 persen.
Formula	:	<i>Jumlah pengangguran perempuan</i>
Perhitungan		$\frac{\text{Jumlah pengangguran perempuan usia 45 – 49 tahun}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan usia 45 – 49 tahun}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia

Nama	:	Tingkat pengangguran terbuka untuk
Indikator		kelompok Perempuan usia 50-54 Tahun
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Tingkat pengangguran terbuka
Definisi	:	Perbandingan penduduk perempuan usia 50-54 tahun yang termasuk dalam kategori pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan usia 50-54 tahun dikali dengan 100 persen.
Formula	:	<i>Jumlah pengangguran perempuan</i>
Perhitungan	:	$\frac{\text{usia 50 – 54 tahun}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100\%$ <i>usia 50 – 54 tahun</i>
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia

Nama	:	Tingkat pengangguran terbuka untuk
Indikator		kelompok Perempuan usia 55-59 Tahun
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Tingkat pengangguran terbuka
Definisi	:	Perbandingan penduduk perempuan usia 55-59 tahun yang termasuk dalam kategori pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan usia 55-59 tahun dikali dengan 100 persen.
Formula	:	<i>Jumlah pengangguran perempuan</i>
Perhitungan	:	$\frac{\text{usia 55 – 59 tahun}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100\%$ <i>usia 55 – 59 tahun</i>
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia

Nama	: Tingkat pengangguran terbuka untuk
Indikator	kelompok Perempuan usia 60 Tahun Ke atas
Bidang Urusan	: Tenaga Kerja
Konsep	: Tingkat pengangguran terbuka
Definisi	: Perbandingan penduduk perempuan usia ≥ 60 tahun yang termasuk dalam kategori pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan usia ≥ 60 tahun dikali dengan 100 persen.
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah pengangguran perempuan usia } \geq 60 \text{ tahun}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan usia } \geq 60 \text{ tahun}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia

Nama	:	Tingkat pengangguran terbuka untuk
Indikator		kelompok Laki-laki usia 15-19 Tahun
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Tingkat pengangguran terbuka
Definisi	:	Perbandingan penduduk laki-laki usia 15-19 tahun yang termasuk dalam kategori pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan usia 15-19 tahun dikali dengan 100 persen.
Formula	:	<i>Jumlah pengangguran laki – laki</i>
Perhitungan		$\frac{\text{usia 15 – 19 tahun}}{\text{Jumlah angkatan kerja laki – laki}} \times 100\%$ <i>usia 15 – 19 tahun</i>
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia

Nama	:	Tingkat pengangguran terbuka untuk
Indikator		kelompok Laki-laki usia 20-24 Tahun
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Tingkat pengangguran terbuka
Definisi	:	Perbandingan penduduk laki-laki usia 20-24 tahun yang termasuk dalam kategori pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan usia 20-24 tahun dikali dengan 100 persen.
Formula	:	<i>Jumlah pengangguran laki – laki</i>
Perhitungan		$\frac{\text{usia 20 – 24 tahun}}{\text{Jumlah angkatan kerja laki – laki}} \times 100\%$ <i>usia 20 – 24 tahun</i>
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia

Nama	:	Tingkat pengangguran terbuka untuk
Indikator		kelompok Laki-laki usia 25-29 Tahun
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Tingkat pengangguran terbuka
Definisi	:	Perbandingan penduduk laki-laki usia 25-29 tahun yang termasuk dalam kategori pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan usia 25-29 tahun dikali dengan 100 persen.
Formula	:	<i>Jumlah pengangguran laki – laki</i>
Perhitungan		$\frac{\text{usia 25 – 29 tahun}}{\text{Jumlah angkatan kerja laki – laki}} \times 100\%$ <i>usia 25 – 29 tahun</i>
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia

Nama	:	Tingkat pengangguran terbuka untuk
Indikator		kelompok Laki-laki usia 30-34 Tahun
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Tingkat pengangguran terbuka
Definisi	:	Perbandingan penduduk laki-laki usia 30-34 tahun yang termasuk dalam kategori pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan usia 30-34 tahun dikali dengan 100 persen.
Formula	:	<i>Jumlah pengangguran laki – laki</i>
Perhitungan	:	$\frac{\text{usia 30 – 34 tahun}}{\text{Jumlah angkatan kerja laki – laki}} \times 100\%$ <i>usia 30 – 34 tahun</i>
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia

Nama	:	Tingkat pengangguran terbuka untuk
Indikator		kelompok Laki-laki usia 35-39 Tahun
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Tingkat pengangguran terbuka
Definisi	:	Perbandingan penduduk laki-laki usia 35-39 tahun yang termasuk dalam kategori pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan usia 35-39 tahun dikali dengan 100 persen.
Formula	:	<i>Jumlah pengangguran laki – laki</i>
Perhitungan		$\frac{\text{usia 35 – 39 tahun}}{\text{Jumlah angkatan kerja laki – laki}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia

Nama	:	Tingkat pengangguran terbuka untuk
Indikator		kelompok Laki-laki usia 40-44 Tahun
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Tingkat pengangguran terbuka
Definisi	:	Perbandingan penduduk laki-laki usia 40-44 tahun yang termasuk dalam kategori pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan usia 40-44 tahun dikali dengan 100 persen.
Formula	:	<i>Jumlah pengangguran laki – laki</i>
Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah pengangguran laki – laki usia 40 – 44 tahun}}{\text{Jumlah angkatan kerja laki – laki usia 40 – 44 tahun}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia

Nama	:	Tingkat pengangguran terbuka untuk
Indikator		kelompok Laki-laki usia 45-49 Tahun
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Tingkat pengangguran terbuka
Definisi	:	Perbandingan penduduk laki-laki usia 45-49 tahun yang termasuk dalam kategori pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan usia 45-49 tahun dikali dengan 100 persen.
Formula	:	<i>Jumlah pengangguran laki – laki</i>
Perhitungan		$\frac{\text{usia 45 – 49 tahun}}{\text{Jumlah angkatan kerja laki – laki}} \times 100\%$ <i>usia 45 – 49 tahun</i>
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia

Nama	: Tingkat pengangguran terbuka untuk
Indikator	kelompok Laki-laki usia 50-54 Tahun
Bidang Urusan	: Tenaga Kerja
Konsep	: Tingkat pengangguran terbuka
Definisi	: Perbandingan penduduk laki-laki usia 50-54 tahun yang termasuk dalam kategori pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan usia 50-54 tahun dikali dengan 100 persen.
Formula	: $\frac{\text{Jumlah pengangguran laki - laki usia 50 - 54 tahun}}{\text{Jumlah angkatan kerja laki - laki usia 50 - 54 tahun}} \times 100\%$
Perhitungan	
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia

Nama	:	Tingkat pengangguran terbuka untuk
Indikator		kelompok Laki-laki usia 55-59 Tahun
Bidang Urusan	:	Tenaga Kerja
Konsep	:	Tingkat pengangguran terbuka
Definisi	:	Perbandingan penduduk laki-laki usia 55-59 tahun yang termasuk dalam kategori pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan usia 55-59 tahun dikali dengan 100 persen.
Formula	:	<i>Jumlah pengangguran laki – laki</i>
Perhitungan		$\frac{\text{usia 55 – 59 tahun}}{\text{Jumlah angkatan kerja laki – laki}} \times 100\%$ <i>usia 55 – 59 tahun</i>
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia

Nama	: Tingkat pengangguran terbuka untuk
Indikator	kelompok Laki-laki usia 60 Tahun Ke atas
Bidang Urusan	: Tenaga Kerja
Konsep	: Tingkat pengangguran terbuka
Definisi	: Perbandingan penduduk laki-laki usia ≥ 60 tahun yang termasuk dalam kategori pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja laki-laki usia ≥ 60 tahun dikali dengan 100 persen.
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah pengangguran laki - laki usia } \geq 60 \text{ tahun}}{\text{Jumlah angkatan kerja laki - laki usia } \geq 60 \text{ tahun}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia



**DINAS
KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN**

Nama	:	Produktivitas padi atau bahan pangan utama
Indikator		lokal lainnya per hektar
Bidang Urusan	:	Pertanian
Konsep	:	Produktivitas bahan pangan utama
Definisi	:	Perbandingan jumlah produksi tanaman padi (ton) dibagi dengan luas area tanaman padi (ha), dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula	:	<i>Produksi tanaman padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (ton)</i>
Perhitungan		$\frac{\text{Luas area tanaman padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (ha)}}{\text{Luas area tanaman padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (ha)}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	:	Proporsi penduduk dengan asupan kalori
Indikator		minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
Bidang Urusan	:	Pangan
Konsep	:	Asupan kalori minimum
Definisi	:	Jumlah penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik



**DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA, DAN
PARIWISATA**

Nama	: Cakupan pembinaan olahraga
Indikator	
Bidang Urusan	: Kepemudaan dan Olahraga
Konsep	: Pembinaan olahraga
Definisi	: Perbandingan jumlah cabang olahraga yang dibina dibagi dengan jumlah seluruh cabang olahraga yang terdaftar, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah cabang olahraga yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	: Cakupan pelatih yang bersertifikasi
Indikator	
Bidang Urusan	: Kepemudaan dan Olahraga
Konsep	: Pelatih bersertifikasi
Definisi	: Perbandingan jumlah pelatih yang bersertifikat dibagi dengan jumlah seluruh pelatih, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah pelatih bersertifikat}}{\text{Jumlah seluruh pelatih}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	:	Cakupan pembinaan atlet muda
Indikator		
Bidang Urusan	:	Kepemudaan dan Olahraga
Konsep	:	Pembinaan atlet muda
Definisi	:	Perbandingan jumlah atlit pelajar yang dibina dibagi dengan jumlah seluruh atlit pelajar, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah atlit pelajar yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh atlit pelajar}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	:	Jumlah wisatawan mancanegara
Indikator		
Bidang Urusan	:	Pariwisata
Konsep	:	Wisatawan mancanegara
Definisi	:	Jumlah wisatawan mancanegara adalah banyaknya jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia.
Formula	:	-
Perhitungan		
Satuan	:	Orang
Produsen Data	:	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	: Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.
Indikator	
Bidang Urusan	: Pariwisata
Konsep	: Kunjungan wisatawan nusantara
Definisi	: Jumlah kunjungan wisatawan nusantara adalah jumlah perjalanan kurang dari 6 bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk bekerja atau sekolah.
Formula	: -
Perhitungan	
Satuan	: Orang
Produsen Data	: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	: Jumlah devisa sektor pariwisata.
Indikator	
Bidang Urusan	: Pariwisata
Konsep	: Devisa sektor pariwisata
Definisi	: Jumlah devisa sektor pariwisata adalah penerimaan negara dari sektor pariwisata yang berasal dari kunjungan wisatawan mancanegara.
Formula	: -
Perhitungan	
Satuan	: Juta USD
Produsen Data	: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah pekerja pada sektor pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Pariwisata
Konsep	:	Pekerja sektor pariwisata
Definisi	:	Sektor Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah pekerja pada sektor pariwisata}}{\text{Jumlah pekerja}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik



**DINAS PERPUSTAKAAN
UMUM DAN ARSIP
DAERAH**

Nama	:	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Bidang Urusan	:	Perpustakaan
Konsep	:	Koleksi buku
Definisi	:	Perbandingan jumlah koleksi judul buku yang tersedia dibagi dengan jumlah buku yang tersedia di Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah.
Formulasi Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah}}{\text{Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah}}$
Satuan	:	Rasio
Produsen Data	:	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	: Jumlah rata-rata pengunjung
Indikator	perpustakaan/tahun
Bidang Urusan	: Perpustakaan
Konsep	: Pengunjung perpustakaan
Definisi	: Pengunjung perpustakaan adalah perseorangan maupun kelompok yang mengunjungi perpustakaan baik secara luring (ke lokasi) maupun secara daring (memanfaatkan jaringan internet) untuk memanfaatkan layanan perpustakaan.
Formula Perhitungan	: Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
Satuan	: Pengunjung
Produsen Data	: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	: Jumlah koleksi judul buku perpustakaan
Indikator	
Bidang Urusan	: Perpustakaan
Konsep	: Koleksi judul buku
Definisi	: Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
Formula Perhitungan	: Jumlah koleksi judul buku perpustakaan
Satuan	: Judul buku
Produsen Data	: Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017



**DINAS
LINGKUNGAN HIDUP**

Nama	: Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air
Indikator	
Bidang Urusan	: Lingkungan Hidup
Konsep	: Indeks kualitas air
Definisi	: Suatu nilai tanpa satuan yang menggambarkan kualitas air berupa gambaran atau nilai hasil transformasi parameter/indikator kualitas air.
	Klasifikasi:
	1. Sangat Buruk (10-30)
	2. Buruk (30-40)
	3. Sedang (40-50)
	4. Baik (50-60)
	5. Sangat Baik (60-70)
Formula	: -
Perhitungan	
Satuan	: Indeks
Produsen Data	: Dinas Lingkungan Hidup
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	:	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara
Indikator		
Bidang Urusan	:	Lingkungan Hidup
Konsep	:	Indeks kualitas udara
Definisi	:	Suatu nilai tanpa satuan yang menunjukkan kualitas udara, berupa hasil transformasi parameter (indikator) polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Pada saat ini penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO ₂ dan SO ₂ . Parameter NO ₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan SO ₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Klasifikasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat Baik (100 > I > 90) 2. Baik (90 > I > 70) 3. Cukup (70 > I > 50) 4. Kurang (50 > I > 30) 5. Sangat Kurang (30 > I > 0)
Formula	:	-
Perhitungan		
Satuan	:	Indeks
Produsen Data	:	Dinas Lingkungan Hidup
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	:	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Indikator	:	Lahan
Bidang Urusan	:	Lingkungan Hidup
Konsep	:	Indeks kualitas tutupan lahan
Definisi	:	Suatu nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan lahan terhadap fungsi lindung. Tutupan lahan adalah tutupan vegetasi pada hamparan daratan yang diinterpretasi menggunakan citra satelit. Indeks Kualitas Tutupan Lahan dihitung berdasarkan parameter luas tutupan hutan, semak belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung, serta luas Ruang Terbuka Hijau (Hutan Kota, Taman Kota, Kebun Raya, Taman Kehati, dan Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan).
		Klasifikasi:
		1. Sangat Baik ($90 < X \leq 100$)
		2. Baik ($70 < X \leq 90$)
		3. Sedang ($50 < X \leq 70$)
		4. Buruk ($25 < X \leq 50$)
		5. Sangat Buruk ($0 < X \leq 25$)
Formula	:	-
Perhitungan	:	-
Satuan	:	Indeks
Produsen Data	:	Dinas Lingkungan Hidup
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	:	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA
Indikator		
Bidang Urusan	:	Lingkungan Hidup
Konsep	:	Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
Definisi	:	Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
Formula	:	Jumlah MHA yang diakui
Perhitungan		
Satuan	:	MHA
Produsen Data	:	Dinas Lingkungan Hidup
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

Nama	: Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak
Indikator	pengetahuan tradisional
Bidang Urusan	: Lingkungan Hidup
Konsep	: Hak kearifan lokal
Definisi	: Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
Formula Perhitungan	: Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang diverifikasi
Satuan	: MHA/Kearifan Lokal/Pengetahuan Tradisional
Produsen Data	: Dinas Lingkungan Hidup
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

Nama	:	Penetapan hak MHA
Indikator		
Bidang Urusan	:	Lingkungan Hidup
Konsep	:	Hak Masyarakat Hukum Adat
Definisi	:	Jumlah penetapan hak MHA
Formula	:	-
Perhitungan		
Satuan	:	Hak MHA
Produsen Data	:	Dinas Lingkungan Hidup
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	:	Terfasilitasi kegiatan peningkatan
Indikator	:	pengetahuan dan keterampilan MHA
Bidang Urusan	:	Lingkungan Hidup
Konsep	:	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan Masyarakat Hukum Adat
Definisi	:	Perbandingan jumlah MHA yang difasilitasi dibagi dengan total MHA, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah MHA yang difasilitasi}}{\text{Jumlah MHA}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Lingkungan Hidup
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	:	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana
Indikator	:	MHA
Bidang Urusan	:	Lingkungan Hidup
Konsep	:	Penyediaan sarana/prasarana Masyarakat Hukum Adat
Definisi	:	Perbandingan jumlah MHA yang diberikan sarana/prasarana dibagi dengan total MHA, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah MHA yang diberikan sarana/prasarana}}{\text{Jumlah MHA}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Lingkungan Hidup
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	:	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Lingkungan Hidup
Konsep	:	Pendidikan dan pelatihan masyarakat
Definisi	:	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kota.
Formula	:	-
Perhitungan	:	
Satuan	:	Pelatihan
Produsen Data	:	Dinas Lingkungan Hidup
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	:	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup
Indikator	:	Lingkungan Hidup
Bidang Urusan	:	Pemberian penghargaan
Konsep	:	Penghargaan yang diberikan kepada mereka, baik individu, maupun kelompok, yang dinilai berjasa dalam merintis, mengabdikan, menyelamatkan, dan membina Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Definisi	:	Ada/Tidak ada
Formula	:	
Perhitungan	:	
Satuan	:	-
Produsen Data	:	Dinas Lingkungan Hidup
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017

Nama Indikator	:	Ruang publik yang berubah peruntukannya
Bidang Urusan	:	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	:	Ruang publik
Definisi	:	Perbandingan jumlah ruang publik yang berubah fungsi (ha) dibagi dengan jumlah ruang publik yang tersedia (ha), dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (ha)}}{\text{Jumlah ruang publik yang tersedia (ha)}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Lingkungan Hidup
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	:	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	:	Sistem pengelolaan lumpur tinja
Definisi	:	Banyaknya rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja, baik terjadwal maupun tidak (on call basis), dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Lingkungan Hidup
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
Indikator		
Bidang Urusan	:	Lingkungan Hidup
Konsep	:	Kualitas air sungai
Definisi	:	Kualitas air permukaan sebagai air baku merupakan pendekatan dalam mengetahui kualitas air ambien yang baik pada badan air. Air permukaan meliputi air yang berada pada sungai, danau dan waduk/bendungan yang perlu dipelihara kualitasnya sebagai sumber air baku.
Formula	:	-
Perhitungan		
Satuan	:	Indeks
Produsen Data	:	Dinas Lingkungan Hidup
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah wilayah sungai yang memiliki
Indikator	:	partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.
Bidang Urusan	:	Lingkungan Hidup
Konsep	:	Daerah tangkapan sungai dan danau
Definisi	:	Wilayah Sungai yang pengelolaannya melibatkan partisipasi masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian, pendayagunaan hingga upaya pengendalian daya rusak airnya.
Formula	:	-
Perhitungan	:	
Satuan	:	Wilayah
Produsen Data	:	Dinas Lingkungan Hidup
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase sampah perkotaan yang
Indikator		tertangani.
Bidang Urusan	:	Lingkungan Hidup
Konsep	:	Sampah perkotaan
Definisi	:	Capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terpilah di sumber sampah, diangkut ke tempat TPA atau pengolahan sampah baik menjadi bahan baku dan/atau sumber energi, diolah menjadi bahan baku, dimanfaatkan menjadi sumber energi serta diproses di TPA.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah sampah perkotaan yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh sampah perkotaan}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Lingkungan Hidup
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi
Indikator	:	limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).
Bidang Urusan	:	Lingkungan Hidup
Konsep	:	Limbah B3
Definisi	:	Jumlah limbah B3 yang terkelola sesuai peraturan perundangan adalah jumlah seluruh timbulan limbah B3 dari berbagai kegiatan industri yang dikelola selama tahun berjalan. Jumlah limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan adalah jumlah timbulan limbah B3 yang dikurangi dan/atau dihilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racunnya menurut jenis pengolahan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan.
Formula	:	$LB3_M + LB3_A + LB3_T + LB3_P$
Perhitungan	:	LB3M : Timbulan limbah B3 dari sektor industri manufaktur yang dikelola LB3A : Timbulan limbah B3 dari sektor agroindustri yang dikelola LB3T : Timbulan limbah B3 dari sektor pertambangan, energi dan migas yang dikelola LB3P : Timbulan limbah B3 dari sektor prasarana jasa yang dikelola
Satuan	:	Ton
Produsen Data	:	Dinas Lingkungan Hidup
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	: Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
Indikator	
Bidang Urusan	: Lingkungan Hidup
Konsep	: Daur ulang sampah
Definisi	: Jumlah timbulan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik) yang melalui upaya pengurangan, pembatasan dan pemanfaatan kembali. Jumlah timbulan yang didaur ulang dihitung dari berbagai tempat daur ulang termasuk dari unit recycle center (pusat daur ulang) skala kota yang sudah beroperasi.
Formula	: -
Perhitungan	
Satuan	: Ton/m ³
Produsen Data	: Dinas Lingkungan Hidup
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase penyelesaian tindak pidana
Indikator	:	lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.
Bidang Urusan	:	Lingkungan Hidup
Konsep	:	Penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup
Definisi	:	Perbandingan jumlah penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup sampai pada pemberitahuan bahwa hasil penyelidikan kasus telah selesai terhadap jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi.
Formula	:	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup}}{\text{Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup}} \times 100\%$
Perhitungan	:	
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Lingkungan Hidup
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Insentif penghematan air pertanian/
Indikator		perkebunan dan industri.
Bidang Urusan	:	Lingkungan Hidup
Konsep	:	Insentif penghematan air
Definisi	:	Tersedianya regulasi di tingkat daerah yang mengatur upaya penghematan air dalam rangka pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan efektif untuk berbagai sektor pembangunan.
Formula Perhitungan	:	Ada/Tidak
Satuan	:	-
Produsen Data	:	Dinas Lingkungan Hidup
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Lingkungan Hidup
Konsep	:	Kawasan konservasi
Definisi	:	Jumlah kawasan suaka alam dengan nilai indeks METT minimal 70% ditambah dengan jumlah kawasan pelestarian alam dengan nilai indeks METT minimal 70% ditambah dengan Jumlah taman buru dengan nilai indeks METT minimal 70% yang dinyatakan dengan satuan kawasan konservasi.
Formula Perhitungan	:	-
Satuan	:	Kawasan Konservasi
Produsen Data	:	Dinas Lingkungan Hidup
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah peserta Proper yang mencapai
Indikator		minimal ranking BIRU.
Bidang Urusan	:	Lingkungan Hidup
Konsep	:	Proper Biru
Definisi	:	Peserta Proper ranking Biru ditambah dengan banyaknya peserta Proper ranking Hijau ditambah dengan banyaknya peserta Proper ranking Emas yang dinyatakan dengan satuan perusahaan.
Formula	:	-
Perhitungan		
Satuan	:	Peserta
Produsen Data	:	Dinas Lingkungan Hidup
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

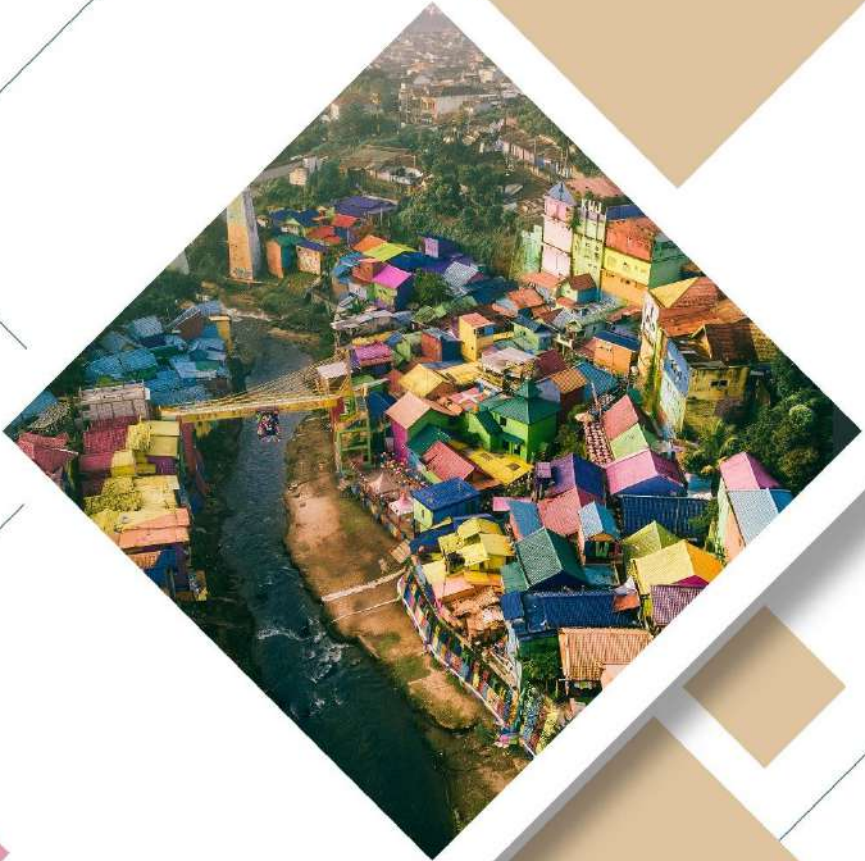
Nama	:	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang
Indikator		dilakukan updating dan revitalisasi.
Bidang Urusan	:	Lingkungan Hidup
Konsep	:	Stasiun hidrologi dan klimatologi
Definisi	:	Stasiun hidrologi dan klimatologi yang mengalami pembaharuan dan pengembangan baik pada alat pengukuran yang digunakan maupun sarana dan prasarananya.
Formula	:	-
Perhitungan		
Satuan	:	Stasiun
Produsen Data	:	Dinas Lingkungan Hidup
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Lingkungan Hidup
Konsep	:	Penggunaan air tanah
Definisi	:	<p>Penghematan penggunaan Air Tanah oleh pengguna Air Tanah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menggunakan Air Tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan; b. mengurangi penggunaan Air Tanah; c. menggunakan kembali Air Tanah; d. mendaur ulang Air Tanah; e. mengambil Air Tanah sesuai dengan kebutuhan; f. menggunakan Air Tanah sebagai alternatif terakhir; g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air; h. memberikan insentif bagi pelaku penghematan Air Tanah; dan/atau i. memberikan disinsentif bagi pelaku pemborosan Air Tanah
Formula	:	-
Perhitungan	:	
Satuan	:	Cara
Produsen Data	:	Dinas Lingkungan Hidup
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase Perubahan Emisi CO ₂ /Emisi Gas Rumah Kaca
Indikator	:	Rumah Kaca
Bidang Urusan	:	Lingkungan Hidup
Konsep	:	Perubahan emisi CO ₂ /emisi gas rumah kaca
Definisi	:	Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Emisi Gas Rumah Kaca adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu. Tingkat Emisi (Juta Ton) diperoleh dengan cara mengalikan Data aktifitas dengan Faktor Emisi. Data aktifitas (AD) adalah besaran kuantitatif kegiatan manusia yang melepas Emisi Gas Rumah Kaca, sedangkan Faktor E misi adalah faktor yang menunjukkan intensitas emisi per unit aktivitas yang bergantung kepada berbagai parameter terkait proses kimia yang terjadi.
Formulasi	:	<i>Tingkat Emisi (TE) = Data Aktifitas (AD) × Faktor Emisi (EF)</i>
Perhitungan	:	$Perubahan\ Emisi\ CO_2 = \left(\frac{TE_t - TE_{t-1}}{TE_{t-1}} \right) \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Lingkungan Hidup
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Rasio Emisi CO ₂ /Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Lingkungan Hidup
Konsep	:	Rasio emisi CO ₂ /emisi gas rumah kaca
Definisi	:	Rasio Emisi CO ₂ /Emisi Gas Rumah Kaca dengan Nilai Tambah Sektor Industri dihitung untuk mengukur tingkat emisi gas CO ₂ yang dihasilkan terhadap nilai tambah sektor industri. Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Emisi Gas Rumah Kaca adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu. Industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru,” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Tingkat Emisi CO}_2}{\text{Nilai tambah sektor industri manufaktur}} \times 100\%$
Satuan	:	Rasio
Produsen Data	:	Dinas Lingkungan Hidup
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Rumusan kebijakan dan rekomendasi
Indikator	:	karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hewani dan nabati
Bidang Urusan	:	Lingkungan Hidup
Konsep	:	Keamanan hewani dan nabati
Definisi	:	Indikator telah tercapai melalui ketersediaan rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati menjadi indikasi adanya langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan mengurangi dampak, serta upaya mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif.
Formula	:	-
Perhitungan	:	
Satuan	:	Kebijakan
Produsen Data	:	Dinas Lingkungan Hidup
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik



**DINAS PEKERJAAN
UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN**

Nama	:	Rasio permukiman layak huni
Indikator		
Bidang Urusan	:	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Konsep	:	Permukiman layak huni
Definisi	:	Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
Formula	:	$\frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}}$
Perhitungan		
Satuan	:	Rasio
Produsen Data	:	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016

Nama	:	Persentase pemukiman yang tertata
Indikator		
Bidang Urusan	:	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Konsep	:	Permukiman yang tertata
Definisi	:	Perbandingan luas area permukiman yang tertata dibagi dengan luas area permukiman keseluruhan, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula	:	$\frac{\text{Luas area permukiman tertata}}{\text{Luas area permukiman keseluruhan}} \times 100\%$
Perhitungan		
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	:	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Lingkungan Hidup
Konsep	:	Jaringan informasi sumber daya air
Definisi	:	Jaringan informasi sumber daya air merupakan sistem informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi. Jaringan ini harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang Sumber Daya Air. Informasi Sumber Daya Air meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan Sumber Daya Air, Prasarana Sumber Daya Air, teknologi Sumber Daya Air, lingkungan pada Sumber Daya Air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air.
Formula Perhitungan	:	-
Satuan	:	Jaringan
Produsen Data	:	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Referensi	:	Undang-Undang No. 17 Tahun 2019

Nama	:	Kegiatan penataan kelembagaan pengelolaan sumber daya air.
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	:	Kelembagaan sumber daya air
Definisi	:	Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Formula	:	-
Perhitungan	:	
Satuan	:	Kegiatan
Produsen Data	:	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Referensi	:	Undang-Undang No. 17 Tahun 2019

Nama	:	Persentase kondisi mantap jalan
Indikator	:	Kabupaten/Kota (persen)
Bidang Urusan	:	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	:	Kondisi mantap jalan
Definisi	:	Kondisi mantap jalan (%) kota merupakan proporsi dari panjang jalan kota yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan nasional. Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka International Roughness Index (IRI), di bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Panjang jalan kota yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang}}{\text{Total panjang jalan kota}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase Rumah Tangga yang menempati
Indikator	:	hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak (%)
Bidang Urusan	:	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	:	Akses sanitasi layak
Definisi	:	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) yang layak di suatu kota terhadap seluruh rumah tangga yang ada di kota tersebut.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	:	Akses air minum layak
Definisi	:	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang terlindung meliputi air ledeng/keran, keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah di suatu kota terhadap seluruh rumah tangga pada kota tersebut (tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani
Indikator	:	rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau
Bidang Urusan	:	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	:	Kapasitas prasarana air baku
Definisi	:	Jumlah kapasitas prasarana air baku rumah tangga, perkotaan, industri dan pulau-pulau kecil dibagi dengan banyaknya sektor yang terlayani (4 sektor) dinyatakan dengan satuan meter kubik per detik (m ³ /dtk).
Formula	:	-
Perhitungan		
Satuan	:	m ³ /dtk
Produsen Data	:	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan
Indikator	:	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Bidang Urusan	:	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	:	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Definisi	:	Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM guna mendukung peningkatan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan terutama upaya menghentikan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
Formula	:	-
Perhitungan	:	
Satuan	:	Kelurahan
Produsen Data	:	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation
Indikator	:	Free (ODF)/Stop Buang Air Sembarangan (SBS)
Bidang Urusan	:	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	:	Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Sembarangan (SBS)
Definisi	:	Jumlah kelurahan yang sudah ditetapkan sebagai Kelurahan Open Defecation Free (ODF) / Stop Buang Air Sembarangan.
Formula Perhitungan	:	-
Satuan	:	Kelurahan
Produsen Data	:	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem
Indikator	:	pengelolaan air limbah terpusat.
Bidang Urusan	:	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	:	Sistem pengelolaan air limbah terpusat
Definisi	:	Proporsi rumah tangga (RT) yang tersambung kepada sistem pengolahan air limbah domestik terpusat skala kota, kawasan, dan komunal (atau jumlah SR pada sistem terpusat pengolahan air limbah domestik skala kota, kawasan dan komunal) dibandingkan dengan jumlah total rumah tangga yang terlayani dan tidak terlayani.
Formula	:	<i>Jumlah rumah tangga yang tersambung kepada sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat</i>
Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang tersambung kepada sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	: Panjang pembangunan jalan tol
Indikator	
Bidang Urusan	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konsep	: Pembangunan jalan tol
Definisi	: Panjang jalan tol yang telah terbangun dan dioperasikan diukur dalam satuan km.
Formula	: -
Perhitungan	
Satuan	: km
Produsen Data	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik



INSPEKTORAT DAERAH KOTA MALANG

Nama	: Opini BPK terhadap laporan keuangan
Indikator	
Bidang Urusan	: Keuangan
Konsep	: Opini BPK
Definisi	: Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Formula	: Hasil Opini BPK
Perhitungan	
Satuan	: -
Produsen Data	: Inspektorat
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004

Nama	: Jumlah temuan BPK
Indikator	
Bidang Urusan	: Pengawasan
Konsep	: Temuan BPK
Definisi	: Temuan adalah hasil dari pemeriksaan atas kinerja pemerintah oleh BPK.
Formula	: -
Perhitungan	
Satuan	: -
Produsen Data	: Inspektorat
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004

Nama	:	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)
Indikator		
Bidang Urusan	:	Pengawasan
Konsep	:	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)
Definisi	:	Indeks yang mengukur tingkat permisif masyarakat terhadap perilaku korupsi. Di Indonesia IPAK diukur dengan menggunakan survei yang menilai perilaku anti korupsi termasuk di dalamnya terkait dengan penyusunan yaitu Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). 1. 0 - 1,25 (Sangat permisif) 2. 1,26 - 2,5 (Permisif) 3. 2,51 - 3,75 (Anti korupsi) 4. 3,76 - 5 (Sangat anti korupsi)
Formula	:	-
Perhitungan		
Satuan	:	Indeks
Produsen Data	:	Inspektorat
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama Indikator	:	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan Keuangan Pemerintah Kota.
Bidang Urusan	:	Pengawasan
Konsep	:	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Definisi	:	Opini WTP yaitu opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
Formula Perhitungan	:	$\frac{Opini\ WTP_t - Opini\ WTP_{t-1}}{Opini\ WTP_{t-1}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Inspektorat
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik



**Satuan Polisi Pamong Praja
Sekretariat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sekretariat Dewan**

Nama	:	Cakupan pelayanan bencana kebakaran
Indikator	:	kabupaten/kota
Bidang Urusan	:	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Konsep	:	Pelayanan bencana kebakaran
Definisi	:	Sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran, selanjutnya disingkat WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran}}{\text{Luas wilayah kota}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Satuan Polisi Pamong Praja
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2012

Nama	: Cakupan sarana prasarana perkantoran
Indikator	pemerintahan kelurahan yang baik
Bidang Urusan	: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Konsep	: Sarana prasarana kantor kelurahan
Definisi	: Perbandingan jumlah kantor kelurahan yang baik dibagi dengan jumlah seluruh kantor kelurahan, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah kantor kelurahan yang baik}}{\text{Jumlah kantor kelurahan}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Sekretariat Daerah
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	:	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan
Indikator	:	Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister
Bidang Urusan	:	Pengawasan
Konsep	:	Standar Pelayanan Masyarakat (SPM)
Definisi	:	Fasilitas publik yang menyediakan layanan bagi masyarakat meliputi sarana, informasi, edukasi dan apresiasi dengan fokus konten efisiensi pengelolaan sumber daya (energi, air dan material) dan pelaksanaan pengelolaan sampah.
Formula Perhitungan	:	-
Satuan	:	Fasilitas Publik
Produsen Data	:	Sekretariat Daerah
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama Indikator	:	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM internasional
Bidang Urusan	:	Pengawasan
Konsep	:	Kebijakan diskriminatif menurut hukum HAM internasional
Definisi	:	Kebijakan yang diskriminatif adalah kebijakan yang memuat unsur pembatasan, perbedaan, pengucilan dan/atau pengabaian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan atas dasar apapun, termasuk agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
Formula Perhitungan	:	-
Satuan	:	Kebijakan
Produsen Data	:	Sekretariat Daerah
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah kolaborasi tematik quickwins program.
Indikator		
Bidang Urusan	:	Pengawasan
Konsep	:	Kolaborasi tematik quickwins program
Definisi	:	Dokumen rencana aksi berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan prinsip keberkelanjutan pada sektor/tema tertentu, yang meliputi perilaku ramah lingkungan, minimum waste, pemanfaatan sesuai daya dukung fisik dan memperhatikan keseimbangan ekologis.
Formula	:	-
Perhitungan		
Satuan	:	Kolaborasi
Produsen Data	:	Sekretariat Daerah
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase instansi pemerintah yang memiliki
Indikator	:	nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Kota
Bidang Urusan	:	Pengawasan
Konsep	:	Indeks Reformasi Birokrasi
Definisi	:	Jumlah instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi $\geq B$ (Baik) dibagi seluruh jumlah instansi pemerintah dikali 100%
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah instansi pemerintah dengan} \\ \text{Indeks Reformasi Birokrasi} \geq B \text{ (Baik)}}{\text{Jumlah instansi pemerintah}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Sekretariat Daerah
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase kepatuhan pelaksanaan UU
Indikator	:	Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Kota
Bidang Urusan	:	Pengawasan
Konsep	:	Pelaksanaan UU Pelayanan Publik
Definisi	:	Perilaku lembaga untuk melaksanakan ketentuan terkait penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Formula	:	<i>Jumlah instansi pemerintah yang patuh melaksanakan UU Pelayanan Publik</i>
Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah instansi pemerintah yang patuh melaksanakan UU Pelayanan Publik}}{\text{Jumlah instansi pemerintah}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Sekretariat Daerah
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas
Indikator	:	Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
Bidang Urusan	:	Pengawasan
Konsep	:	Peningkatan SAKIP
Definisi	:	SAKIP yaitu rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
Formulasi Perhitungan	:	$\frac{\text{Nilai SAKIP}_t - \text{Nilai SAKIP}_{t-1}}{\text{Nilai SAKIP}_{t-1}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Sekretariat Daerah
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah
Indikator	:	tangga
Bidang Urusan	:	Energi dan Sumber Daya Mineral
Konsep	:	Sambungan jaringan gas
Definisi	:	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga (Sambungan Rumah (SR)) merupakan banyaknya jaringan distribusi gas bumi (penyaluran gas melalui jaringan pipa) untuk rumah tangga. Jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dibangun di kota-kota atau daerah yang dekat dengan sumber gas bumi dan memiliki jaringan transmisi gas bumi.
Formula	:	-
Perhitungan	:	
Satuan	:	SR
Produsen Data	:	Sekretariat Daerah
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Intensitas energi primer
Indikator		
Bidang Urusan	:	Energi dan Sumber Daya Mineral
Konsep	:	Energi primer
Definisi	:	Energi primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. (Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional).Intensitas energi primer adalah total pasokan energi primer per unit produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli dengan satuan Setara Barel Minyak (SBM) per milliar rupiah.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Total pasokan energi primer}}{\text{Produk Domestik Bruto berdasarkan Paritas Daya Beli}} \times 100\%$
Satuan	:	SBM per milliar rupiah
Produsen Data	:	Sekretariat Daerah
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase penggunaan E-procurement
Indikator	:	terhadap belanja pengadaan.
Bidang Urusan	:	Keuangan
Konsep	:	Belanja pengadaan
Definisi	:	Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Formula	:	<i>Jumlah pengadaan barang/jasa</i>
Perhitungan	:	$\frac{\text{yang menggunakan e - procurement}}{\text{Jumlah pengadaan barang/jasa}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Sekretariat Daerah
Referensi	:	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase LSM aktif
Indikator		
Bidang Urusan	:	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Konsep	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
Definisi	:	Perbandingan jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh Lembaga Swadaya Masyarakat, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula	:	$\frac{\text{Jumlah LSM aktif}}{\text{Jumlah LSM}} \times 100\%$
Perhitungan		
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

Nama	:	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran
Indikator	:	Hak Asasi Manusia (HAM)
Bidang Urusan	:	Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Konsep	:	Penanganan pengaduan pelanggaran HAM
Definisi	:	Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum melawan, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Formula	:	-
Perhitungan	:	
Satuan	:	Kasus
Produsen Data	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

Nama	:	Terintegrasi program- program DPRD untuk
Indikator		melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat Dewan DPRD
Bidang Urusan	:	Sekretariat Dewan
Konsep	:	Dokumen perencanaan dan dokumen anggaran DPRD
Definisi	:	DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi diantaranya pembentukan perda Kabupaten/Kota, anggaran, dan pengawasan. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, DPRD menjaring aspirasi masyarakat.
Formula Perhitungan	:	Ada/Tidak
Satuan	:	-
Produsen Data	:	Sekretariat Dewan
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

Nama	:	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada
Indikator	:	setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota
Bidang Urusan	:	Sekretariat Dewan
Konsep	:	Alat kelengkapan DPRD
Definisi	:	DPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang memiliki Alat Kelengkapan Dewan yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
Formula	:	Ada/Tidak
Perhitungan	:	
Satuan	:	-
Produsen Data	:	Sekretariat Dewan
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018

Nama Indikator	: Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)
Bidang Urusan	: Sekretariat Dewan
Konsep	: RPJM dan RKPD
Definisi	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Formula Perhitungan	: Ada/Tidak
Satuan	: -
Produsen Data	: Sekretariat Dewan
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004



OTORITAS JASA KEUANGAN

Nama	:	Persentase BPR/LKM aktif
Indikator		
Bidang Urusan	:	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Konsep	:	BPR/LKM
Definisi	:	Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah BPR atau LKM aktif}}{\text{Jumlah seluruh BPR atau LKM}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Otoritas Jasa Keuangan
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013

Nama	:	Rasio pinjaman terhadap Simpanan di Bank
Indikator	:	Umum
Bidang Urusan	:	Aspek Daya Saing Daerah
Konsep	:	Bank umum
Definisi	:	Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah pinjaman di bank umum}}{\text{Dana pihak ketiga di bank umum}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Otoritas Jasa Keuangan
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

Nama Indikator	: Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR
Bidang Urusan	: Aspek Daya Saing Daerah
Konsep	: BPR
Definisi	: Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah pinjaman di BPR}}{\text{Dana pihak ketiga di BPR}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Otoritas Jasa Keuangan
Referensi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Undang-Undang No. 10 Tahun 1999

Nama Indikator	:	Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa
Bidang Urusan	:	Keuangan
Konsep	:	Jumlah ATM
Definisi	:	Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah mesin dengan sistem komputer yang diaktifkan dengan menggunakan kartu magnetik bank yang berkode atau bersandi. Melalui mesin tersebut tersebut nasabah dapat menabung, mengambil uang tunai, mentransfer dana antar-rekening, dan transaksi rutin lainnya. Jumlah ATM dalam perhitungan ini adalah ATM yang tercatat sebagai aset Bank dan ATM yang dikelola dan menjadi tanggung jawab bank pelapor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Umum dan ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Umum Syariah. Penduduk Dewasa adalah semua penduduk di suatu kota yang berusia 15 tahun atau lebih.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah ATM}}{\text{Jumlah penduduk dewasa (berusia } \geq 15 \text{ tahun)}} \times 100.000$
Satuan	:	Unit
Produsen Data	:	Otoritas Jasa Keuangan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk
Indikator		dewasa
Bidang Urusan	:	Keuangan
Konsep	:	Jumlah kantor bank
Definisi	:	Kantor Bank adalah sebagai seluruh jaringan/unit kantor bank yang tercatat dapat memberikan layanan keuangan kepada nasabah (melakukan kegiatan operasional) dan terpisah secara fisik dengan kantor utamanya, antara lain meliputi: Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas, Unit Usaha Syariah, Kas Mobil, Payment Point, Agency, dan Deposit Taking Company (DTC). Jaringan kantor adalah Jaringan Kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Umum dan ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Umum Syariah. Penduduk Dewasa adalah semua penduduk di suatu kota yang berusia 15 tahun atau lebih.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah jaringan kantor}}{\text{Jumlah penduduk dewasa (berusia } \geq 15 \text{ tahun)}} \times 100.000$
Satuan	:	Unit
Produsen Data	:	Otoritas Jasa Keuangan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Rata-rata jarak Lembaga keuangan (Bank Umum)
Indikator	:	Umum)
Bidang Urusan	:	Keuangan
Konsep	:	Jarak lembaga keuangan (bank umum)
Definisi	:	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum) merupakan rata-rata jarak lembaga keuangan (bank umum) dari kantor kelurahan. Hal ini untuk mengukur aksesibilitas penduduk terhadap layanan keuangan formal.
Formula Perhitungan	:	-
Satuan	:	km
Produsen Data	:	Otoritas Jasa Keuangan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik



KEPOLISIAN RESORT DAERAH

Nama Indikator	:	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Bidang Urusan	:	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Konsep	:	Penegakan hukum atas kasus kekerasan perempuan dan anak
Definisi	:	Perbandingan jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dibagi dengan jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan, dinyatakan dalam satuan persen (%). Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang – undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak}}{\text{Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Kepolisian Resort Kota Malang
Referensi	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Nama	:	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Sosial
Konsep	:	Angka kematian
Definisi	:	Jumlah kematian akibat bunuh diri (data dari kepolisian maupun dari pelayanan kesehatan) dibagi jumlah seluruh kematian dan dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah kematian akibat bunuh diri}}{\text{Jumlah kematian}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Kepolisian Resort Kota Malang
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Konsep	:	Kejahatan pembunuhan
Definisi	:	Kasus-kasus yang terjadi akibat kejahatan tindakan pembunuhan pada satu tahun terakhir, yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kedua Kejahatan, Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan kematian.
Formula	:	-
Perhitungan	:	
Satuan	:	Kasus
Produsen Data	:	Kepolisian Resort Kota Malang
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Konsep	:	Kematian disebabkan konflik
Definisi	:	Jumlah korban meninggal akibat konflik dalam satu tahun terakhir dibagi dengan jumlah penduduk pada 12 bulan terakhir dikalikan 100.000 penduduk.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah korban meninggal akibat konflik}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
Satuan	:	Proporsi per 100.000 penduduk
Produsen Data	:	Kepolisian Resort Kota Malang
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi penduduk yang menjadi korban
Indikator	:	kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir
Bidang Urusan	:	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Konsep	:	Korban kejahatan kekerasan
Definisi	:	Perbandingan jumlah penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan seperti (1) pencurian, (2) pencurian dengan kekerasan, (3) penganiayaan, (4) pelecehan seksual, (5) penculikan, (6) pemerasan, dan lainnya dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut, dinyatakan dalam satuan persen.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang mengalami} \\ \text{kejahatan kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Kepolisian Resort Kota Malang
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi penduduk yang merasa aman
Indikator	:	berjalan sendirian di area tempat tinggalnya
Bidang Urusan	:	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Konsep	:	Area tempat tinggal penduduk
Definisi	:	Perbandingan jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut, dinyatakan dalam satuan persen.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Kepolisian Resort Kota Malang
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi korban kekerasan 12 bulan terakhir
Indikator	:	yang melaporkan kepada polisi.
Bidang Urusan	:	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Konsep	:	Korban kejahatan kekerasan
Definisi	:	Perbandingan jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut, dinyatakan dalam satuan persen.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan yang melaporkan kepada polisi}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Kepolisian Resort Kota Malang
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Konsep	:	Masa penahanan
Definisi	:	Perbandingan jumlah tahanan yang melebihi masa penahanan pada akhir tahun t dibagi dengan jumlah tahanan pada akhir tahun t, dinyatakan dalam satuan persen.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah tahanan yang melebihi masa penahanan}}{\text{Jumlah tahanan}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Kepolisian Resort Kota Malang
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah penanganan pengaduan Hak Asasi Manusia (HAM)
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Konsep	:	Pengaduan HAM
Definisi	:	Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.
Formula	:	-
Perhitungan	:	
Satuan	:	Kasus
Produsen Data	:	Kepolisian Resort Kota Malang
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Nama	: Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.
Indikator	
Bidang Urusan	: Keuangan
Konsep	: Lembaga pembiayaan infrastruktur
Definisi	: Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.
Formula	: -
Perhitungan	
Satuan	: Usaha
Produsen Data	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009

Nama Indikator	:	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Bidang Urusan	:	Keuangan
Konsep	:	Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
Definisi	:	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan risiko diantara para pihak. Proyek KPBU yang telah dilelangkan meliputi proyek KPBU dengan kondisi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Sudah menandatangani perjanjian kerjasama; b. Sudah ditetapkan pemenang; dan/atau c. Sedang dalam proses pelelangan.
Formula Perhitungan	:	<i>Proyek yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama</i> + <i>Proyek yang sudah ditetapkan pemenang</i> + <i>proyek yang sedang dalam proses pelelangan</i>
Satuan	:	Proyek
Produsen Data	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Keuangan
Konsep	:	Alokasi pemerintah untuk KPBU
Definisi	:	Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan Negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektifitas KPBU. Pelaksanaan KPBU terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan KPBU 2. Penyiapan KPBU 3. Transaksi KPBU
Formula	:	<i>Jumlah alokasi penyiapan KPBU</i>
Perhitungan	:	<i>+ Jumlah alokasi untuk transaksi KPBU</i> <i>+ Jumlah alokasi dukungan pemerintah untuk proyek KPBU</i>
Satuan	:	Rupiah
Produsen Data	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Perencanaan Pembangunan
Konsep	:	Indikator SDGs
Definisi	:	Kemampuan lembaga statistik dan pemerintah untuk menghasilkan indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.
Formula	:	<i>Jumlah indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target</i>
Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah indikator global SDGs}}{\text{Jumlah indikator global SDGs}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran
Indikator	:	Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Bidang Urusan	:	Perencanaan Pembangunan
Konsep	:	RPDAST, RTRW
Definisi	:	Rencana pengelolaan DAS yang masuk dalam kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah baik berdasarkan wilayah administratif, fungsi, kegiatan dan nilai strategis kawasan.
Formula	:	-
Perhitungan	:	
Satuan	:	Program
Produsen Data	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Nama	:	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena
Indikator	:	dampak bencana per 100.000 orang.
Bidang Urusan	:	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Konsep	:	Korban dampak bencana
Definisi	:	Jumlah korban meninggal, hilang, terluka, dan mengungsi akibat bencana dibagi dengan jumlah penduduk, dikalikan 100.000 penduduk.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah korban meninggal, hilang, terluka, dan mengungsi akibat bencana}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$
Satuan	:	Proporsi per 100.000 penduduk
Produsen Data	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Konsep	:	Pengurangan risiko bencana daerah
Definisi	:	Daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas dalam hal penguatan pengurangan risiko bencana daerah.
Formula	:	-
Perhitungan	:	
Satuan	:	Daerah/lokasi
Produsen Data	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial
Indikator	:	yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)
Bidang Urusan	:	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Konsep	:	Pendidikan layanan khusus daerah bencana
Definisi	:	Daerah yang memiliki program pendidikan layanan khusus bencana berupa pendidikan pengurangan risiko bencana dalam bentuk Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB), Tanggap Darurat Bidang Pendidikan dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Bidang Pendidikan Pasca Bencana.
Formula Perhitungan	:	-
Satuan	:	Daerah
Produsen Data	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Konsep	:	Indeks risiko bencana
Definisi	:	Suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.
Formula	:	-
Perhitungan	:	
Satuan	:	Indeks
Produsen Data	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Konsep	:	Pengurangan risiko bencana daerah
Definisi	:	Dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim.
Formula Perhitungan	:	-
Satuan	:	Dokumen
Produsen Data	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase masyarakat tangguh bencana
Indikator		
Bidang Urusan	:	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Konsep	:	Masyarakat tangguh bencana
Definisi	:	Masyarakat yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah masyarakat tangguh bencana}}{\text{Jumlah masyarakat pada daerah rawan bencana}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Referensi	:	SIPD SDG's Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 1 Tahun 2011

Nama	:	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Konsep	:	Kelurahan tangguh bencana
Definisi	:	Kelurahan tangguh bencana adalah kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana.
Formula Perhitungan	:	-
Satuan	:	Kelurahan
Produsen Data	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Referensi	:	SIPD SDG's Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 1 Tahun 2012

Nama	:	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim
Indikator		secara kebencanaan
Bidang Urusan	:	Lingkungan Hidup
Konsep	:	Sistem peringatan dini kebencanaan
Definisi	:	Sistem pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu kota oleh lembaga yang berwenang.
Formula	:	-
Perhitungan		
Satuan	:	Sistem
Produsen Data	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik



**DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN**

**CABANG DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH MALANG-BATU**

Nama	:	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15
Indikator		Tahun ke Atas
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Rata-rata lama sekolah
Definisi	:	Jumlah tahun belajar penduduk usia ≥ 15 tahun yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).
Formula	:	-
Perhitungan		
Satuan	:	Tahun
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi anak-anak dan remaja:(a) pada kelas
Indikator	:	4, (b) tingkat akhir SD/Kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/Kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam (i) membaca, (ii) matematika
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Standar kemampuan minimum siswa
Definisi	:	Jumlah anak-anak dan orang muda diakhir pendidikan SD atau menengah, mencapai atau melebihi tingkat kemahiran minimum, dinyatakan sebagai persentase dari semua anak-anak dan orang muda di akhir tingkat pendidikan primer atau tingkat pendidikan menengah.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah siswa tingkat } - i \text{ yang mencapai atau melebihi standar kemampuan minimum } - j}{\text{Jumlah siswa tingkat } - i} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi anak-anak pada kelas 4 yang
Indikator	:	mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Standar kemampuan minimum siswa
Definisi	:	Perbandingan jumlah anak-anak kelas 4 yang mencapai atau melebihi standar kemampuan minimum dalam membaca dibagi dengan jumlah semua anak-anak kelas 4, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula	:	<i>Jumlah siswa kelas 4 yang mencapai/melebihi standar kemampuan minimum dalam membaca</i>
Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah siswa kelas 4 yang mencapai/melebihi standar kemampuan minimum dalam membaca}}{\text{Jumlah siswa kelas 4}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi anak-anak pada kelas 4 yang
Indikator	:	mencapai standar kemampuan minimum dalam matematika
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Standar kemampuan minimum siswa
Definisi	:	Perbandingan jumlah anak-anak kelas 4 yang mencapai atau melebihi standar kemampuan minimum dalam matematika dibagi dengan jumlah semua anak-anak kelas 4, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula	:	<i>Jumlah siswa kelas 4 yang mencapai/melebihi standar kemampuan minimum dalam matematika</i>
Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah siswa kelas 4 yang mencapai/melebihi standar kemampuan minimum dalam matematika}}{\text{Jumlah siswa kelas 4}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi anak-anak tingkat akhir SD/Kelas 6
Indikator	:	yang mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Standar kemampuan minimum siswa
Definisi	:	Perbandingan jumlah anak-anak tingkat akhir SD/kelas 6 yang mencapai atau melebihi standar kemampuan minimum dalam membaca dibagi dengan jumlah semua anak-anak kelas 6, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah siswa kelas 6 yang mencapai/melebihi standar kemampuan minimum dalam membaca}}{\text{Jumlah siswa kelas 6}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi anak-anak tingkat akhir SD/Kelas 6
Indikator	:	yang mencapai standar kemampuan minimum dalam matematika
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Standar kemampuan minimum siswa
Definisi	:	Perbandingan jumlah anak-anak tingkat akhir SD/kelas 6 yang mencapai atau melebihi standar kemampuan minimum dalam matematika dibagi dengan jumlah semua anak-anak kelas 6, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah siswa kelas 6 yang mencapai/melebihi standar kemampuan minimum dalam matematika}}{\text{Jumlah siswa kelas 6}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi remaja tingkat akhir SMP/Kelas 9
Indikator	:	yang mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Standar kemampuan minimum siswa
Definisi	:	Perbandingan jumlah remaja tingkat akhir SMP/Kelas 9 yang mencapai atau melebihi standar kemampuan minimum dalam membaca dibagi dengan jumlah semua remaja kelas 9, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula	:	<i>Jumlah siswa kelas 9 yang mencapai/melebihi standar kemampuan minimum dalam membaca</i>
Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah siswa kelas 9 yang mencapai/melebihi standar kemampuan minimum dalam membaca}}{\text{Jumlah siswa kelas 9}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi remaja tingkat akhir SMP/Kelas 9
Indikator	:	yang mencapai standar kemampuan minimum dalam matematika
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Standar kemampuan minimum siswa
Definisi	:	Perbandingan jumlah remaja tingkat akhir SMP/Kelas 9 yang mencapai atau melebihi standar kemampuan minimum dalam matematika dibagi dengan jumlah semua remaja kelas 9, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah siswa kelas 9 yang mencapai/melebihi standar kemampuan minimum dalam matematika}}{\text{Jumlah siswa kelas 9}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama Indikator	: Persentase SD/MI berakreditasi minimal B
Bidang Urusan	: Pendidikan
Konsep	: SD/MI berakreditasi minimal B
Definisi	: Perbandingan antara jumlah SD/MI dengan akreditasi A dan B terhadap jumlah SD/MI, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah SD/MI dengan akreditasi A dan B}}{\text{Jumlah SD/MI}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B
Indikator		
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	SMP/MTs berakreditasi minimal B
Definisi	:	Perbandingan antara jumlah SMP/MTs dengan akreditasi A dan B terhadap jumlah SMP/MTs, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula	:	$\frac{\text{Jumlah SMP/MTs dengan akreditasi A dan B}}{\text{Jumlah SMP/MTs}} \times 100\%$
Perhitungan		
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama Indikator	:	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Keterampilan TIK untuk remaja dan dewasa
Definisi	:	Perbandingan jumlah penduduk remaja (usia 15-24 tahun) dan jumlah penduduk dewasa (usia 15-59 tahun) yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir dibandingkan jumlah penduduk remaja (usia 15-24 tahun) dan penduduk dewasa (usia 15-59 tahun) pada periode yang sama.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 – 59 tahun yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 – 59 tahun}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase guru TK, SD, SMP, SMK, dan PLB
Indikator	:	yang bersertifikat pendidik
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Persentase guru seluruh jenjang yang bersertifikat pendidik
Definisi	:	Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah guru TK, SD, SMP, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik}}{\text{Jumlah guru TK, SD, SMP, SMK, dan PLB}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Undang-Undang No. 14 Tahun 2005

Nama	:	Angka Partisipasi Murni (APM)
Indikator	:	SD/MI/ sederajat (kelompok penduduk 40% terbawah)
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Angka partisipasi murni penduduk 40% terbawah
Definisi	:	Proporsi penduduk pada kelompok usia 7-12 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat terhadap penduduk kelompok usia 7-12 tahun, dinyatakan dalam persentase. Pendidikan NonFormal (Paket A) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk 40\% terbawah usia 7 – 12 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk 40\% terbawah usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	: Angka Partisipasi Murni (APM)
Indikator	SMP/MTsl/ sederajat (kelompok penduduk 40% terbawah)
Bidang Urusan	: Pendidikan
Konsep	: Angka partisipasi murni penduduk 40% terbawah
Definisi	: Proporsi penduduk pada kelompok usia 13-15 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs/ sederajat terhadap penduduk kelompok usia 13-15 tahun. Pendidikan NonFormal (Paket B) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah penduduk 40\% terbawah usia 13 – 15 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk 40\% terbawah usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama Indikator	: Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B
Bidang Urusan	: Pendidikan
Konsep	: SMA/MA berakreditasi minimal B
Definisi	: Perbandingan antara jumlah SMA/MA dengan akreditasi A dan B terhadap jumlah SMA/MA, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah SMA/MA dengan akreditasi A dan B}}{\text{Jumlah SMA/MA}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a)
Indikator	:	listrik, (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri dari air, sanitasi, da
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Fasilitas pendidikan
Definisi	:	Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri dari air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)). Yang disebut dengan air minum layak adalah air bersih, bukan air minum aman (drinking wakter).
Formula	:	-
Perhitungan	:	
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi SD/MI/ sederajat dengan akses ke (a)
Indikator		listrik
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Fasilitas pendidikan
Definisi	:	Proporsi sekolah tingkat SD/MI/ sederajat dengan akses terhadap fasilitas atau layanan listrik.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah SD/MI/ sederajat yang memiliki akses listrik}}{\text{Jumlah SD/MI/ sederajat}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi SMP/MTs/ sederajat dengan akses ke
Indikator		(a) listrik
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Fasilitas pendidikan
Definisi	:	Proporsi sekolah tingkat SMP/MTs/ sederajat dengan akses terhadap fasilitas atau layanan listrik.
Formula	:	$\frac{\text{Jumlah SMP / MTs / sederajat yang memiliki akses listrik}}{\text{Jumlah SMP / MTs / sederajat}} \times 100\%$
Perhitungan		
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi SMA/SMK/MA/ sederajat dengan
Indikator	:	akses ke (a) listrik
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Fasilitas pendidikan
Definisi	:	Proporsi sekolah tingkat SMA/SMK/MA/ sederajat dengan akses terhadap fasilitas atau layanan listrik.
Formula	:	<i>Jumlah SMA/SMK/MA/ sederajat yang memiliki akses listrik</i>
Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah SMA/SMK/MA/ sederajat yang memiliki akses listrik}}{\text{Jumlah SMA/SMK/MA/ sederajat}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang-Batu Provinsi Jawa Timur
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi SD/MI/ sederajat dengan akses ke (b)
Indikator		internet untuk tujuan pengajaran
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Fasilitas pendidikan
Definisi	:	Proporsi sekolah tingkat SD/MI/ sederajat dengan akses terhadap fasilitas atau layanan internet untuk tujuan pengajaran.
Formula	:	<i>Jumlah SD/MI/ sederajat yang memiliki akses internet</i>
Perhitungan		<i>untuk tujuan pengajaran</i>
		$\frac{\text{Jumlah SD/MI/ sederajat}}{\text{Jumlah SD/MI/ sederajat}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi SMP/MTs/ sederajat dengan akses ke
Indikator		(b) internet untuk tujuan pengajaran
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Fasilitas pendidikan
Definisi	:	Proporsi sekolah tingkat SMP/MTs/ sederajat dengan akses terhadap fasilitas atau layanan internet untuk tujuan pengajaran.
Formula	:	<i>Jumlah SMP/MTs/ sederajat yang memiliki akses internet untuk tujuan pengajaran</i>
Perhitungan		$\frac{\text{Jumlah SMP/MTs/ sederajat}}{\text{Jumlah SMP/MTs/ sederajat}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi SMA/SMK/MA/ sederajat dengan
Indikator	:	akses ke (b) internet untuk tujuan pengajaran
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Fasilitas pendidikan
Definisi	:	Proporsi sekolah tingkat SMA/SMK/MA/ sederajat dengan akses terhadap fasilitas atau layanan internet untuk tujuan pengajaran.
Formula	:	<i>Jumlah SMA/SMK/MA/ sederajat yang memiliki akses internet untuk tujuan pengajaran</i>
Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah SMA/SMK/MA/ sederajat yang memiliki akses internet untuk tujuan pengajaran}}{\text{Jumlah SMA/SMK/MA/ sederajat}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang-Batu Provinsi Jawa Timur
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi SD/MI/ sederajat dengan akses ke (c)
Indikator	:	komputer untuk tujuan pengajaran
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Fasilitas pendidikan
Definisi	:	Proporsi sekolah tingkat SD/MI/ sederajat dengan akses terhadap fasilitas atau layanan komputer untuk tujuan pengajaran.
Formula	:	<i>Jumlah SD/MI/ sederajat yang memiliki akses komputer untuk tujuan pengajaran</i>
Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah SD/MI/ sederajat yang memiliki akses komputer untuk tujuan pengajaran}}{\text{Jumlah SD/MI/ sederajat}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi SMP/MTs/ sederajat dengan akses ke
Indikator		(c) komputer untuk tujuan pengajaran
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Fasilitas pendidikan
Definisi	:	Proporsi sekolah tingkat SMP/MTs/ sederajat dengan akses terhadap fasilitas atau layanan komputer untuk tujuan pengajaran.
Formula	:	<i>Jumlah SMP/MTs/ sederajat yang memiliki akses komputer untuk tujuan pengajaran</i>
Perhitungan		$\frac{\text{Jumlah SMP/MTs/ sederajat}}{\text{Jumlah SMP/MTs/ sederajat}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama Indikator	: Proporsi SMA/SMK/MA/ sederajat dengan akses ke (c) komputer untuk tujuan pengajaran
Bidang Urusan	: Pendidikan
Konsep	: Fasilitas pendidikan
Definisi	: Proporsi sekolah tingkat SMA/SMK/MA/ sederajat dengan akses terhadap fasilitas atau layanan komputer untuk tujuan pengajaran.
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah SMA/SMK/MA/ sederajat yang memiliki akses komputer untuk tujuan pengajaran}}{\text{Jumlah SMA/SMK/MA/ sederajat}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang-Batu Provinsi Jawa Timur
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi SD/MI/ sederajat dengan akses ke (d)
Indikator		air minum layak
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Fasilitas pendidikan
Definisi	:	Proporsi sekolah tingkat SD/MI/ sederajat dengan akses terhadap fasilitas atau layanan air minum layak. Air minum layak yang dimaksud adalah air bersih, bukan air minum aman (drinking wakter).
Formula	:	<i>Jumlah SD/MI/ sederajat yang memiliki akses air minum layak</i>
Perhitungan		$\frac{\text{Jumlah SD/MI/ sederajat yang memiliki akses air minum layak}}{\text{Jumlah SD/MI/ sederajat}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi SMP/MTs/ sederajat dengan akses ke
Indikator		(d) air minum layak
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Fasilitas pendidikan
Definisi	:	Proporsi sekolah tingkat SMP/MTs/ sederajat dengan akses terhadap fasilitas atau layanan air minum layak. Air minum layak yang dimaksud adalah air bersih, bukan air minum aman (drinking water).
Formula	:	<i>Jumlah SMP/MTs/ sederajat yang memiliki akses air minum layak</i>
Perhitungan		$\frac{\text{Jumlah SMP/MTs/ sederajat yang memiliki akses air minum layak}}{\text{Jumlah SMP/MTs/ sederajat}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi SMA/SMK/MA/ sederajat dengan akses ke (d) air minum layak
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Fasilitas pendidikan
Definisi	:	Proporsi sekolah tingkat SMA/SMK/MA/ sederajat dengan akses terhadap fasilitas atau layanan air minum layak. Air minum layak yang dimaksud adalah air bersih, bukan air minum aman (drinking wakter).
Formula	:	<i>Jumlah SMA/SMK/MA/ sederajat yang memiliki akses air minum layak</i>
Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah SMA/SMK/MA/ sederajat yang memiliki akses air minum layak}}{\text{Jumlah SMA/SMK/MA/ sederajat}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang-Batu Provinsi Jawa Timur
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi SD/MI/ sederajat dengan akses ke (e)
Indikator		fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin.
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Fasilitas pendidikan
Definisi	:	Proporsi sekolah tingkat SD/MI/ sederajat dengan akses terhadap fasilitas atau layanan sanitasi dasar per jenis kelamin.
Formula	:	<i>Jumlah SD/MI/ sederajat yang memiliki akses sanitasi dasar per jenis kelamin</i>
Perhitungan		$\frac{\text{Jumlah SD/MI/ sederajat yang memiliki akses sanitasi dasar per jenis kelamin}}{\text{Jumlah SD/MI/ sederajat}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi SMP/MTs/ sederajat dengan akses ke
Indikator	:	(e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin.
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Fasilitas pendidikan
Definisi	:	Proporsi sekolah tingkat SMP/MTs/ sederajat dengan akses terhadap fasilitas atau layanan sanitasi dasar per jenis kelamin.
Formula	:	<i>Jumlah SMP/MTs/ sederajat yang memiliki akses sanitasi dasar per jenis kelamin</i>
Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah SMP/MTs/ sederajat yang memiliki akses sanitasi dasar per jenis kelamin}}{\text{Jumlah SMP/MTs/ sederajat}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama Indikator	:	Proporsi SMA/SMK/MA/ sederajat dengan akses ke (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin.
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Fasilitas pendidikan
Definisi	:	Proporsi sekolah tingkat SMA/SMK/MA/ sederajat dengan akses terhadap fasilitas atau layanan sanitasi dasar per jenis kelamin.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah SMA/SMK/MA/ sederajat yang memiliki akses sanitasi dasar per jenis kelamin}}{\text{Jumlah SMA/SMK/MA/ sederajat}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang-Batu Provinsi Jawa Timur
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi SD/MI/ sederajat dengan akses ke (f)
Indikator	:	fasilitas cuci tangan (terdiri dari air, sanitasi dan higienis bagi semua (WASH))
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Fasilitas pendidikan
Definisi	:	Proporsi sekolah tingkat SD/MI/ sederajat dengan akses terhadap fasilitas atau layanan cuci tangan (terdiri dari air, sanitasi dan higienis bagi semua (WASH)).
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah SD/MI/ sederajat yang memiliki akses cuci tangan (terdiri dari air, sanitasi dan higienis bagi semua (WASH))}}{\text{Jumlah SD/MI/ sederajat}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama Indikator	: Proporsi SMP/MTs/ sederajat dengan akses ke (f) fasilitas cuci tangan (terdiri dari air, sanitasi dan higienis bagi semua (WASH))
Bidang Urusan	: Pendidikan
Konsep	: Fasilitas pendidikan
Definisi	: Proporsi sekolah tingkat SMP/MTs/ sederajat dengan akses terhadap fasilitas atau layanan cuci tangan (terdiri dari air, sanitasi dan higienis bagi semua (WASH)).
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah SMP/MTs/ sederajat yang memiliki akses cuci tangan (terdiri dari air, sanitasi dan higienis bagi semua (WASH))}}{\text{Jumlah SMP/MTs/ sederajat}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama Indikator	: Proporsi SMA/SMK/MA/ sederajat dengan akses ke (f) fasilitas cuci tangan (terdiri dari air, sanitasi dan higienis bagi semua (WASH))
Bidang Urusan	: Pendidikan
Konsep	: Fasilitas pendidikan
Definisi	: Proporsi sekolah tingkat SMA/SMK/MA/ sederajat dengan akses terhadap fasilitas atau layanan cuci tangan (terdiri dari air, sanitasi dan higienis bagi semua (WASH)).
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah SMA/SMK/MA/ sederajat yang memiliki akses cuci tangan (terdiri dari air, sanitasi dan higienis bagi semua (WASH))}}{\text{Jumlah SMA/SMK/MA/ sederajat}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang-Batu Provinsi Jawa Timur
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah guru TK/TKLB yang bersertifikat
Indikator		pendidik
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Jumlah guru bersertifikat pendidik
Definisi	:	Bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru TK/TK Luar Biasa sebagai tenaga profesional.
Formula	:	-
Perhitungan		
Satuan	:	Guru
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Undang-Undang No. 14 Tahun 2005

Nama	:	Jumlah guru SD/SDLB yang bersertifikat
Indikator		Pendidik
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Jumlah guru bersertifikat pendidik
Definisi	:	Bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru SD/SD Luar Biasa sebagai tenaga profesional.
Formula	:	-
Perhitungan		
Satuan	:	Guru
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Undang-Undang No. 14 Tahun 2005

Nama	:	Jumlah guru SMP/SMPLB yang bersertifikat
Indikator		pendidik
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Jumlah guru bersertifikat pendidik
Definisi	:	Bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru SMP/SMP Luar Biasa sebagai tenaga profesional.
Formula	:	-
Perhitungan		
Satuan	:	Guru
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Undang-Undang No. 14 Tahun 2005

Nama	:	Jumlah guru SMA/SMALB yang bersertifikat
Indikator		pendidik
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Jumlah guru bersertifikat pendidik
Definisi	:	Bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru SMA/SMA Luar Biasa sebagai tenaga profesional.
Formula	:	-
Perhitungan		
Satuan	:	Guru
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Undang-Undang No. 14 Tahun 2005

Nama	:	Jumlah guru SMK yang bersertifikat pendidik
Indikator		
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Jumlah guru bersertifikat pendidik
Definisi	:	Bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru SMK sebagai tenaga profesional.
Formula	:	-
Perhitungan		
Satuan	:	Guru
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Undang-Undang No. 14 Tahun 2005

Nama	:	Persentase guru TK/TKLB dengan kualifikasi minimal S1/D4
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Guru dengan kualifikasi minimal S1/D4
Definisi	:	Guru pada PAUD/TK/TKLB/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D4/S1 dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah guru PAUD/TK/TKLB/RA yang kualifikasi pendidikannya minimal D4/S1}}{\text{Jumlah guru PAUD/TK/TKLB/RA}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 16 Tahun 2007

Nama	:	Persentase guru SD/SDLB dengan kualifikasi
Indikator	:	minimal S1/D4
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Guru dengan kualifikasi minimal S1/D4
Definisi	:	Guru pada SD/MI/SDLB harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D4/S1 dalam bidang pendidikan SD/MI (D4/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi, atau dalam bidang program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan untuk SDLB.
Formula	:	<i>Jumlah guru SD/MI/SDLB</i>
Perhitungan	:	$\frac{\text{yang kualifikasi pendidikannya minimal D4/S1}}{\text{Jumlah guru SD/MI/SDLB}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 16 Tahun 2007

Nama	:	Persentase guru SMP/SMPLB dengan
Indikator		kualifikasi minimal S1/D4
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Guru dengan kualifikasi minimal S1/D4
Definisi	:	Guru pada SMP/MTs/SMPLB harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D4/S1 program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi, atau dalam bidang program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan untuk SMPLB.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah guru SMP/MTs/SMPLB yang kualifikasi pendidikannya minimal D4/S1}}{\text{Jumlah guru SMP/MTs/SMPLB}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 16 Tahun 2007

Nama	:	Persentase guru SMA/SMALB dengan
Indikator		kualifikasi minimal S1/D4
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Guru dengan kualifikasi minimal S1/D4
Definisi	:	Guru pada SMA/MA/SMALB harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D4/S1 program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi, atau dalam bidang program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan untuk SMALB.
Formula	:	
Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah guru SMA/MA/SMALB yang kualifikasi pendidikannya minimal D4/S1}}{\text{Jumlah guru SMA/MA/SMALB}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 16 Tahun 2007

Nama	:	Persentase guru SMK dengan kualifikasi minimal S1/D4
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Guru dengan kualifikasi minimal S1/D4
Definisi	:	Guru pada SMK/MAK harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum D4/S1 program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah guru SMK yang kualifikasi pendidikannya minimal D4/S1}}{\text{Jumlah guru SMK}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Referensi	:	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 16 Tahun 2007

Nama	: Angka Partisipasi Murni (APM)
Indikator	: SMA/MA/ sederajat (kelompok penduduk 40% terbawah)
Bidang Urusan	: Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Konsep	: Angka partisipasi murni penduduk 40% terbawah
Definisi	: Proporsi penduduk pada kelompok usia 16-18 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA/ sederajat terhadap penduduk kelompok usia 16-18 tahun dinyatakan dalam satuan persen (%). Pendidikan NonFormal (Paket C) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).
Formula Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah penduduk 40\% terbawah usia 16 – 18 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk 40\% terbawah usia 16 – 18 tahun}} \times 100\%$
Satuan	: %
Produsen Data	: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang-Batu Provinsi Jawa Timur
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik



DINAS PERHUBUNGAN

Nama	:	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan
Indikator	:	umum di perkotaan
Bidang Urusan	:	Perhubungan
Konsep	:	Transportasi umum
Definisi	:	Banyaknya orang yang menggunakan kendaraan bermotor umum di perkotaan dibandingkan dengan jumlah penduduk di perkotaan.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang menggunakan kendaraan bermotor umum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Perhubungan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah bandara
Indikator		
Bidang Urusan	:	Perhubungan
Konsep	:	Bandara
Definisi	:	Bandara atau bandar udara merupakan kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
Formula	:	-
Perhitungan		
Satuan	:	Bandara
Produsen Data	:	Dinas Perhubungan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Panjang jalur kereta api
Indikator		
Bidang Urusan	:	Perhubungan
Konsep	:	Jalur kereta api
Definisi	:	Panjang jalur kereta api (termasuk jalur ganda) adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
Formula	:	-
Perhitungan		
Satuan	:	km
Produsen Data	:	Dinas Perhubungan
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nama	:	Persentase anak (Usia 0 s.d 17 Tahun) yang memiliki akta kelahiran.
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Konsep	:	Akta kelahiran
Definisi	:	Jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia 0-17 tahun, dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula	:	<i>Jumlah penduduk usia 0 – 17 tahun yang memiliki akta kelahiran</i>
Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0 – 17 tahun yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk usia 0 – 17 tahun}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang
Indikator	:	kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut usia.
Bidang Urusan	:	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Konsep	:	Balita yang kelahirannya dicatat
Definisi	:	Jumlah anak usia di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah anak usia di bawah 5 tahun dikalikan 100%.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah anak usia} \leq 5 \text{ tahun yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah anak usia} \leq 5 \text{ tahun}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama Indikator	:	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.
Bidang Urusan	:	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Konsep	:	Akta lahir penduduk 40% berpendapatan bawah
Definisi	:	Jumlah penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah dikalikan 100%.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk 40\% terbawah usia 0 - 17 tahun yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk 40\% terbawah usia 0 - 17 tahun}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik



**BADAN PUSAT
STATISTIK**

Nama	:	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik
Indikator	:	(Badan Pusat Statistik) yang merasa puas dengan kualitas data statistik
Bidang Urusan	:	Statistik
Konsep	:	Kualitas data statistik
Definisi	:	Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data statistik.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah konsumen BPS yang puas dengan kualitas data statistik}}{\text{Jumlah konsumen BPS}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Badan Pusat Statistik
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase konsumen yang menjadikan data
Indikator	:	dan informasi statistik Badan Pusat Statistik sebagai rujukan utama
Bidang Urusan	:	Statistik
Konsep	:	Data dan informasi statistik sebagai rujukan utama
Definisi	:	Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) untuk menghasilkan data dan informasi statistik sebagai rujukan utama.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah konsumen BPS yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama}}{\text{Jumlah konsumen BPS}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Badan Pusat Statistik
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)
Indikator	:	
Bidang Urusan	:	Statistik
Konsep	:	Metadata kegiatan
Definisi	:	Kemampuan lembaga statistik (Badan Pusat Statistik) menghimpun metadata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus.
Formula	:	-
Perhitungan	:	
Satuan	:	Metadata
Produsen Data	:	Badan Pusat Statistik
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.
Indikator		
Bidang Urusan	:	Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Konsep	:	PDRB per kapita
Definisi	:	Laju pertumbuhan PDRB per kapita diperoleh dengan mengurangi nilai PDRB per kapita pada periode ke-t terhadap nilai pada periode ke-(t-1) (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada periode ke-(t-1), dikalikan dengan 100 persen. PDRB yang digunakan yaitu PDRB Per kapita dengan harga konstan.
Formula Perhitungan	:	$\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Badan Pusat Statistik
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	: Pertumbuhan ekspor produk non migas
Indikator	
Bidang Urusan	: Aspek Daya Saing Daerah
Konsep	: Ekspor produk non migas
Definisi	: Ekspor non migas merupakan agregasi ekspor barang di luar komoditas minyak dan gas. Kelompok ekspor barang non-migas dicatat berdasarkan klasifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik).
Formula	: $\frac{Ekspor\ non\ migas_t - Ekspor\ non\ migas_{t-1}}{Ekspor\ non\ migas_{t-1}} \times 100\%$
Perhitungan	
Satuan	: %
Produsen Data	: Badan Pusat Statistik
Referensi	: Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB
Indikator		
Bidang Urusan	:	Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Konsep	:	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB
Definisi	:	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB diperoleh dari membagi penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata yang terdiri dari konsumsi wisatawan nusantara, pengeluaran pemerintah untuk pariwisata, investasi pariwisata, dan ekspor netto jasa perjalanan (ekspor jasa perjalanan dikurangi impor jasa perjalanan) dengan PDRB pada harga berlaku, dikalikan dengan 100 persen.
Formulasi Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah pengeluaran ekonomi untuk pariwisata}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Badan Pusat Statistik
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase angka melek huruf penduduk
Indikator	:	berusia \geq 15 tahun.
Bidang Urusan	:	Pendidikan
Konsep	:	Angka melek huruf
Definisi	:	Perbandingan jumlah penduduk berusia \geq 15 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya terhadap jumlah penduduk berusia \geq 15 tahun.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk berusia } \geq 15 \text{ tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin/lainnya}}{\text{Jumlah penduduk berusia } \geq 15 \text{ tahun}} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Badan Pusat Statistik
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Persentase rumah tangga miskin dan rentan
Indikator	:	yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (kelompok penduduk 40% terbawah)
Bidang Urusan	:	Sosial
Konsep	:	Sumber penerangan rumah tangga miskin
Definisi	:	Perbandingan jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya dari listrik baik PLN dan bukan PLN dibagi dengan jumlah rumah tangga yang miskin dan rentan dinyatakan dalam satuan persen (%).
Formula Perhitungan	:	$\frac{RT\ miskin\ pelanggan\ PLN + RT\ miskin\ pelanggan\ Non\ PLN}{Jumlah\ rumah\ tangga\ (RT)\ miskin} \times 100\%$
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Badan Pusat Statistik
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Rasio elektrifikasi.
Indikator		
Bidang Urusan	:	Energi dan Sumber Daya Mineral
Konsep	:	Rasio elektrifikasi
Definisi	:	Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Sedangkan listrik non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).
Formula	:	$\frac{RT\ pelanggan\ PLN + RT\ pelanggan\ Non\ PLN}{Jumlah\ rumah\ tangga\ (RT)} \times 100\%$
Perhitungan		
Satuan	:	%
Produsen Data	:	Badan Pusat Statistik
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

Nama	:	Konsumsi listrik per kapita.
Indikator		
Bidang Urusan	:	Energi dan Sumber Daya Mineral
Konsep	:	Konsumsi listrik per kapita
Definisi	:	Konsumsi Listrik per kapita (Kwh/Kapita) adalah perbandingan jumlah penjualan tenaga listrik dengan jumlah penduduk.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Total penggunaan energi listrik}}{\text{Jumlah penduduk}}$
Satuan	:	Kwh/Kapita
Produsen Data	:	Badan Pusat Statistik
Referensi	:	Metadata Indikator SDGs Indonesia Badan Pusat Statistik

